

NEWSLETTER

PKSPARLEMEN

KREATIF, ATRAKTIF, SUBSTANSIAL

Edisi Mei | Tahun 2025 No. 60

FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
Kreatif | Atraktif | Substansial



*Dukungan ke
Mahkamah Internasional*

Hentikan Genosida

*dan Soal Pendudukan
Israel yang Ilegal*

*Dr. H. M. Hidayat
Nur Wahid, M.A*



Menjadi politisi, pejabat publik baik di eksekutif maupun legislatif adalah posisi yang terhormat (noble). Namun kehormatan itu harus dipahami berbanding lurus dengan etika dan tanggung jawab kepada publik. Oleh karena itu kita membiasakan menyebut para politisi sebagai pejuang politik karena tujuan mulia yang diemban para politisi yaitu memperjuangkan kemaslahatan umum (bangsa dan negara).

Pertama, sebagai politisi dan partai politik, pasti harapannya ingin menang, berkuasa dan memimpin pemerintahan baik di level pusat maupun daerah. Namun apa tujuan politisi menang dan akhirnya berkuasa atau memerintah negara. Tentu kita semua berharap menang bukan sembarang menang, tapi menang untuk menebarkan kebaikan bagi negeri ini. Untuk memberikan kontribusi terbaik bagi rakyat, bangsa, dan negara. Agar Indonesia maju dan sejahtera. NKRI jaya dalam persatuan bangsa-bangsa. Sama sekali bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok kita.

Maka bagi setiap politisi, jangan ada pikiran untuk merusak bangsa dan negara ini, tidak boleh ada pikiran untuk melemahkan bangsa ini dengan seluruh karakter dan kebaikan yang melekat padanya. Apalagi politisi partai Islam yang terus berjuang untuk membangun senyawa antara keislaman dan keindonesiaan, antara keiman-



Nasihat Bagi Para Pejuang Politik

dan nasionalisme, sebagai mana para ulama dan tokoh bangsa telah mencontohkan di masa lalu. Kita ingin menampilkan wajah Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang penuh kedamaian, toleransi, dan semangat persatuan. Islam yang moderat atau wasathiyah, Islam yang solitif, berkarakter dan ber-kemajuan. Dalam konteks tersebut para pejuang politik hadir untuk menjaga dan menyemarakkan ke-Indonesiaan bukan dengan menghormati dan memajukan budaya bangsa.

Kedua, perlu kita pahami dan pahami berulang kali bahwa Indonesia tanah air kita ini bangsa yang sangat besar, beragam budaya, suku bangsa, dan agama. Kita kaya dengan sumber daya manusia, kaya sumber daya alam, jutaan keanekaragaman hayati (flora dan fauna) ada di sini. Kita kaya sumber daya mineral yang valuasinya bisa ratusan, ribuan bahkan jutaan triliun, dan

seterusnya. Kita punya seluruh potensi menjadi bangsa besar. Sayangnya semua potensi itu belum menjadi aktual. Maka jangan pernah ada pikiran untuk mengecilkan bangsa ini. Kita ingat betul pesan Bung Hatta, proklamator kita, jangan sampai bangsa yang besar ini bertemu dengan manusia-manusia kecil. Para pejabat publik haruslah manusia-manusia dengan jiwa besar yang punya pemikiran besar untuk memajukan bangsa ini.

Ketiga, selain memahami kebesaran bangsa dan negara Indonesia, kita harus memahaminya agar permasalahan bangsa dan solusinya agar kita bisa maju. Untuk itu kita harus menyelami denyut nadi masyarakat kita, bergaul dan berinteraksi dengan mereka, kebersamaan mereka dalam segala keadaannya. Masyarakat itu sifat dan karakternya macam-macam. Ada yang baik, ada yang berbingas, ada yang banyak tingkah, dan seterusnya.

Pejabat publik harus hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai pemimpin mereka. Dalam konteks tersebut, pemimpin bangsa ini dalam level apapun semestinya memosisikan diri sebagai seorang ayah, dan memperlakukan rakyatnya yang beragam sifat dan karakter itu sebagai anak-anaknya. Maka seorang ayah akan sayang dan berlaku adil kepada anak-anaknya, dan adil itu tidak harus sama rata tapi disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing anaknya.

Kita melihat akar masalah bangsa ini belum sepenuhnya bisa bersatu, berkejasama, dan berkolaborasi secara tulus untuk membesarkan bangsa kita. Di sana-sini masih ada kepentingan pribadi dan golongan yang lebih ditonjolkan, masih kuat ego pribadi dan ego sektoral yang dipertontonkan, sengkarak kepentingan oligarki yang merusak demokrasi dan sendi-sendi kebangsaan. Dalam kondisi demikian, PKS berharap

betul dan bekerja serius untuk memunculkan sosok pemimpin yang adil, tulus, profesional dan berintegritas.

Dengan pemahaman di atas seorang politisi apalagi pejabat publik harus pandai-pandai menempatkan diri ketika tampil di depan publik. Pertama, rakyat suka jika politisi dan pejabat publik itu tampil konsisten dan elegan dalam berpolitik. Tidak sibuk berpolemik, tapi selalu hadir dalam urusan-urusan publik. Hadir itu berarti memahami persoalan, mampu berkomunikasi dengan baik, melakukan edukasi dan membangunkan kesadaran publik, serta memberikan solusi yang jitu atas permasalahan yang dihadapi masyarakat.

Kedua, pejabat juga suka politisi yang selalu memberikan semangat dan optimisme melalui sikap, pendapat, dan pandangannya. Tidak terseret arus pragmatisme dan oportunisme yang kerap dipertontonkan secara vulgar. Publik suka pejabat publik yang terbuka, humble dan tidak berjarak. Di sini kita semua berharap seluruh pejabat publik mampu menjadi teladan dan oase bagi rakyat dengan menghadirkan konsistensi dalam membela kepentingan rakyat. Konsistensi dalam melayani dan membantu rakyat. Serta konsistensi dalam menambatkan politik yang bermartabat sesuai koridor nilai-nilai Pancasila dan Konstitusi UUD 1945.

Fraksi PKS Dukung Presiden Prabowo Selamatkan Rakyat Palestina dan Usir Penjajah Israel

Jakarta (15/04) — Fraksi PKS menyambut baik dan mendukung langkah konkrit Presiden Prabowo untuk menyelamatkan nyawa rakyat Palestina dari kebiadaban Israel dengan mengobati mereka yang terluka dengan perawatan dan pelayanan medis yang layak dan tuntas.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini merespon pertanyaan sejumlah media atas rencana Presiden Prabowo untuk mengevakuasi dan mengobati rakyat Palestina.

Menurut Anggota Komisi I DPR, rencana Presiden ini menunjukkan solidaritas kemanusiaan bangsa Indonesia, bahwa kita tidak tinggal diam melihat korban rakyat sipil, bayi, anak-anak, perempuan, dan orang tua tanpa berbuat apa-apa. Kita memilih untuk mengevakuasi dan mengobati mereka yang bisa diselamatkan karena semua rumah sakit dan layanan medis

sudah dihancurkan oleh Israel.

"Kita sepakati dulu prinsipnya bahwa harus ada aksi nyata untuk menyelamatkan korban jiwa rakyat Palestina. Ini adalah upaya darurat untuk menyelamatkan korban sipil dengan evakuasi dan ini bukan relokasi warga Palestina dari tanah tinggal mereka. Karena faktanya di Gaza dan tempat-tempat pengungsian tidak ada lagi fasilitas medis, rumah sakit, dokter, obat-obatan. Semuanya sudah dihancurkan oleh kebiadaban penjajah Israel," tegas Jazuli.

Secara teknis, lanjut Wakil

Tetap Parlemen Dunia (IPU) Untuk Urusan Timur Tengah ini, upaya penyelamatan itu harus dilakukan dengan melibatkan persetujuan dan kerjasama dengan berbagai pihak yang peduli dengan kemanusiaan rakyat Palestina mulai dari otoritas Palestina, negara-negara kawasan hingga komunitas internasional. Termasuk hal-hal teknis seperti skema penanganan, lokasi, dan fasilitas perawatannya yang memadai dan representatif.

"Namun hal-hal teknis itu tidak boleh mengesampingkan tindakan nyata, cepat, dan tepat dalam menyelamatkan nyawa rakyat Palestina yang bisa diselamatkan segera atas nama kemanusiaan. Di sinilah kita mengapresiasi langkah strategis Presiden Prabowo," untkapnya.

Pada saat yang sama, Fraksi PKS bersama-sama Pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia konsisten berada di belakang rakyat dan pejuang Palestina dalam merebut kemerdekaannya dari penjajah Israel. Sampai kapan pun kita tidak akan rela rakyat Palestina diambil tanah dan wilayahnya oleh penjajah Israel.

Indonesia baik pemerintah, parlemen, maupun rakyatnya terus mendukung para pejuang dan rakyat Palestina dengan seluruh kemampuan yang kita punya baik melalui bantuan moral, materil, maupun melalui diplomasi global yang



"Kita akan terus menggalang kekuatan global untuk menghentikan penjajahan dan mengusir Israel dari Palestina, sehingga pada saatnya seluruh rakyat Palestina merasakan kemerdekaan dan kedaulatan di tanah mereka sendiri

Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA

Ketua Fraksi PKS DPR RI

tidak pernah absen menggalang nasib Palestina, baik secara bilateral maupun melalui forum-forum multilateral.

"Kita akan terus menggalang kekuatan global untuk menghentikan penjajahan dan mengusir Israel dari Palestina, sehingga pada saatnya seluruh

rakyat Palestina merasakan kemerdekaan dan kedaulatan di tanah mereka sendiri. Ini adalah amanat konstitusi sekaligus hutang sejarah bangsa Indonesia yang akan kita perjuangkan sampai Palestina merdeka," pugkas Jazuli.



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
Kreatif Atakraf Substantif

KONSOLIDASI NASIONAL & BIMTEKNAS

PIMPINAN DEWAN & ANGGOTA FRAKSI PKS SE INDONESIA

KOKOH MELAYANI, KONSISTEN MENGABDI

Jakarta, 28-30 April 2025





image istimewa

Serukan Konsolidasi Spiritual dan Nasionalisme Konsolnas Fraksi PKS, Habib Salim: Bangun Persatuan, Wujudkan Kemenangan !

Jakarta (28/04) — Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Dr. Salim Segaf Aljufri, memberikan pidato penuh semangat dalam pembukaan Konsolidasi Nasional dan Bimbingan Teknis Nasional (Bimteknas) Anggota Fraksi PKS se-Indonesia di Ruang Birawa, Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (28/04/2025).

Dalam sambutannya, Dr. Salim menekankan pentingnya keteguhan dalam perjuangan, penguatan komunikasi dan kolaborasi, serta menjaga persatuan bangsa di tengah berbagai tantangan nasional dan global.

"Bangun komunikasi, kolaborasi yang berjalan terus-menerus. Jangan pernah lelah berbuat untuk negeri ini," tegas Dr. Salim.

la mengingatkan seluruh

anggota Fraksi PKS bahwa konsolidasi bukan hanya soal strategi politik, tetapi juga tentang mengokohkan spiritualitas.

Dr. Salim mencontohkan pentingnya keikhlasan dalam setiap tindakan, sekecil apapun itu, karena di sisi Allah, keikhlasan-lah yang menumbuhkan keberkahan.

"Tidak usah menunggu balasan dari manusia. Seperti benih yang disebar di bumi, nanti akan tumbuh dengan izin Allah," ucapnya.

Selain itu, Dr. Salim menggarisbawahi pentingnya menjaga persatuan bangsa Indonesia yang sangat beragam.

la menggambarkan kekhayalan bangsa Indonesia 1.300-an suku bangsa, lebih dari 700 bahasa, dan lebih dari 17.000 pulau — sebagai anugerah besar yang harus dikelola

“Bangsa ini mampu memimpin dunia, jika kita sukses mengelola keberagaman ini,”

Dr. SALIM

Ketua Majelis Syuro PKS

**KONSOLIDASI
NASIONAL &
BIMTEKNAS**
PEMBUKAAN DEWAN & ANGGOTA FRAKSI PKS SE-INDONESIA
KOKOH MELAYANI, KONSISTEN MENGAJARI

dengan baik.

"Bangsa ini mampu memimpin dunia, jika kita sukses mengelola keberagaman ini," ujarnya optimistis.

Menyikapi dinamika global dan domestik, Dr. Salim juga mengingatkan tentang pentingnya memanfaatkan peluang bonus demografi menuju 2045 serta perkembangan pesat teknologi informasi.

la menyerukan agar kader PKS mampu bergerak cepat, cermat, dan tepat dalam menjawab tantangan zaman.

Mengakhiri sambutannya, Dr. Salim kembali menegaskan komitmen PKS terhadap perjuangan kemanusiaan, khususnya untuk Palestina.

"Perjuangan membela Palestina bukan hanya karena keimanan, tapi juga perintah konstitusi kita. Kita harus menjadi yang terdepan dalam memperjuangkan kemerdekaan dan keadilan dunia," seru Dr. Salim dengan penuh semangat, sebelum kemudian memimpin peserta untuk meneriakkan, "Free-free Palestine!".



image istimewa

Konsolnas FPKS Tahun 2025; Bersama Koalisi Pemerintah, PKS Makin Kokoh Melayani dan Membela Rakyat

Jakarta (01/05) --- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar acara Konsolidasi Nasional Fraksi PKS DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada tanggal 28-30 Mei 2025 di Hotel Bidakara Jakarta. Acara ini diikuti oleh seluruh anggota legislatif PKS dari pusat hingga daerah yang berjumlah 1.585 peserta.

Acara dibuka oleh Ketua Majelis Syura PKS Salim Segaf Aljufri yang dihantarkan dengan sambutan dari Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini, Sekjen PKS Aboe Bakar Al-Habsyi dan Presiden PKS Ahmad Syaikh.

Menurut Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini, Konsolidasi Nasional Fraksi PKS dari pusat hingga daerah ini memiliki tiga tujuan utama.

Pertama, mengokohkan soliditas dalam perjuangan untuk melayani dan membela kepentingan umat, rakyat, bangsa dan negara.

"Soliditas dalam mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan Asta Cita menuju Indonesia maju dan sejahtera," ungkapnya.

"Kedua, Konsolnas Fraksi PKS ini bernilai strategis dalam rangka peningkatan kapasitas anggota legislatif PKS sehingga kinerjanya berdampak dan dirasakan rakyat," terang Jazuli.

Ketiga, Konsolnas Fraksi

PKS penting sebagai sarana memperkuat sinergi dan kolaborasi anggota legislatif PKS dari pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota sehingga gerak langkahnya bagai gelombang yang memecah samudera dalam menghadirkan solusi-solusi kerakyatan dan kebangsaan.

"Pemilu telah usai. Anggota legislatif PKS adalah orang-orang yang istimewa karena mendapat kepercayaan rakyat. Saatnya sekarang merealisasikan janji-janji yang kita sampaikan kepada rakyat pada waktu pemilu dengan kerja nyata," tegas Jazuli

Pesan Politik Kebangsaan Ketua Majelis Syura PKS

Sementara itu, Ketua Majelis Syura PKS Salim Segaf Aljufri berharap Konsolidasi Nasional Fraksi PKS ini menjadi menjadi batu pijakan atau milestone yang kokoh dalam



Konsolnas FPKS Tahun 2025; Bersama Koalisi Pemerintah, PKS Makin Kokoh Melayani dan Membela Rakyat

« SEBELUMNYA

keberpihakan, kepedulian, pelayanan, dan pembelaan Fraksi PKS terhadap kepentingan umat, kepentingan rakyat, bangsa, dan negara.

Menteri Sosial RI 2009-2014 ini menyampaikan 6 pesan politik kepada peserta Konsolnas, yaitu

Pertama, pentingnya memperkuat dan dan merapatkan barisan dalam perjuangan politik di parlemen; "Kedua, memperkuat dan meningkatkan pelayanan dan pembelaan kepada rakyat," ungkapnya.

Ketiga, lanjut Dr. Salim, membangun sinergi dan kolaborasi dengan seluruh elemen bangsa.

"Keempat, menjaga persatuan, kebhinekaan, dan nasionalisme Indonesia; Kelima, menangkap peluang bonus demografi dan kemajuan teknologi informasi; serta Keenam, menjaga kualitas dan keseimbangan spiritual, emosional, intelektual, dan fisik (jasmani)," jelasnya.

Free Free Palestine Menggema di Arena Konsolnas Fraksi PKS
Konsolidasi Nasional Fraksi PKS juga menjadi ajang solidaritas terhadap perjuangan rakyat Palestina. Seluruh peserta Konsolnas Fraksi PKS selama acara mengenakan syal Palestina sebagai bentuk dukungan penuh PKS terhadap kemerdekaan Palestina dan penghapusan segala bentuk penjajahan yang dilakukan Israel.

Ketua Majelis Syura PKS Salim Segaf Aljufri dan Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini memimpin seluruh peserta konsolnas untuk mengangkat syal Palestina dan meneriakkan pekik semangat 'Free Free Palestine!'

Bagi PKS dukungan terhadap perjuangan rakyat Palestina untuk mendapatkan kemerdekaannya merupakan amanat Konstitusi UUD 1945 sekaligus bentuk tanggung jawab kemanusiaan untuk membebaskan warga dunia yang tertindas dan terjajah.

Rekomendasi Konsolidasi Nasional Fraksi PKS
Kegiatan Konsolidasi Nasional Fraksi PKS se-Indonesia telah berlangsung dengan lancar dan menghasilkan sejumlah kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut.

"Pertama, Menegaskan bahwa anggota Fraksi PKS se-Indonesia adalah para pejuang politik yang selalu siap melayani dan membela kepentingan umat, rakyat, bangsa dan negara," ujar Jazuli.

Kedua, imbuhnya, mendorong setiap Anggota Fraksi PKS se-Indonesia untuk mensukseskan program dan kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam mempercepat

terwujudnya Visi Indonesia Emas 2045 dengan menjadi mitra konstruktif di lembaga legislatif dari pusat hingga daerah.

"Ketiga, memperkuat soliditas antar anggota Fraksi PKS di seluruh Indonesia dalam menjalankan fungsi legislatif, pengawasan, dan penganggaran, serta dalam memperjuangkan agenda kerakyatan di berbagai tingkatan pemerintahan," ujar Anggota DPR RI dari Dapil Banten II ini.

Keempat, lanjutnya, mendorong Anggota Fraksi PKS se-Indonesia untuk selalu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kapasitas dalam menjalankan tugas-tugas legislatif, pengawasan, dan representasi rakyat.

"Kelima, mendorong setiap Anggota Fraksi PKS se-Indonesia untuk membangun komunikasi yang inklusif dan efektif dengan mitra, media, tokoh dan masyarakat luas dalam melaksanakan fungsi-

fungsi legislatif," terang Anggota Komisi I DPR RI ini.

Keenam, kata Jazuli, menjadi bagian dari proses transformasi organisasi dan digital untuk melakukan tata Kelola data dan informasi, dalam rangka meningkatkan kualitas dan efektifitas pengambilan Keputusan.

Selain itu mendorong setiap Anggota Fraksi PKS se-Indonesia untuk memaksimalkan peran kehumasan dan berbagai pengetahuan melalui sistem informasi digital untuk memperkuat kinerja kedewanan.

"Ketujuh, menegaskan kembali komitmen seluruh Anggota Fraksi PKS se-Indonesia untuk menjadi garda terdepan dalam politik yang bersih, santun, dan berorientasi pada kepentingan rakyat, dengan mengedepankan semangat keumatan, kerakyatan, dan kebangsaan," terang Anggota BKSAP DPR RI ini.

Kedelapan, lanjut Jazuli, mendorong setiap Anggota Fraksi PKS se-Indonesia untuk menggalang solidaritas global melalui berbagai sarana termasuk media publikasi yang dimiliki untuk mendukung kemerdekaan Palestina dan menghentikan penjajahan Israel.

Konsolidasi Nasional Fraksi PKS juga menjadi ajang solidaritas terhadap perjuangan rakyat Palestina. Seluruh peserta Konsolnas Fraksi PKS selama acara mengenakan syal Palestina sebagai bentuk dukungan penuh PKS terhadap kemerdekaan Palestina dan penghapusan segala bentuk penjajahan yang dilakukan Israel.



image istimewa

Puncak Milad 23 PKS, Ahmad Syaikhu: PKS Anak Kandung Reformasi dengan DNA Melayani dan Mengabdikan

Jakarta (30/04) — Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Syaikhu, dalam pidato puncak Milad ke-23 PKS yang digelar di Hotel Bidakara, Jakarta, menegaskan kembali semangat dan komitmen partainya untuk terus melayani dan mengabdikan kepada rakyat Indonesia.

"Hari ini begitu istimewa. Kita hadir dalam puncak Milad ke-23 PKS. Di dalamnya, ada catatan sejarah dan perjalanan panjang pengabdian PKS dalam membangun umat, bangsa, dan negara," ujar Syaikhu, Rabu (30/4/2025).

Ia mengungkapkan, usia PKS yang semakin dewasa menunjukkan keteguhan partai

dalam konsistensi perjuangan sejak masa reformasi.

Syaikhu mengajak seluruh kader untuk merefleksikan perjalanan PKS yang kini telah memasuki usia ke-23. Ia menyebut usia tersebut sebagai bentuk kedewasaan partai dalam berpolitik dan berkontribusi bagi bangsa, baik saat berada di luar maupun di dalam pemerintahan.

"PKS adalah bagian dari kesinambungan sejarah dan kelanjutan estafet perjuangan dari Partai Keadilan (PK) yang lahir dari rahim reformasi 1998. Sebagai anak kandung reformasi, PKS berkomitmen menjalankan cita-cita reformasi melalui jalan konstitusional yang bermartabat," tuturnya.

Syaikhu juga menekankan

bahwa DNA kader PKS adalah melayani dan mengabdikan, bukan hanya menjelang pemilu, tetapi sepanjang waktu.

"Dari kota hingga pelosok desa, kader PKS membantu korban bencana, memberdayakan petani, buruh, nelayan, dan UMKM. Bekerja dengan gigih tanpa pamrih, penuh kerelaan, tanpa mengharapkan imbalan," imbuhnya.

Dengan tema Kokoh Melayani, Konsisten Mengabdikan, perayaan Milad ke-23 PKS tahun ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat Indonesia, di tengah berbagai tantangan kebangsaan dan dinamika politik nasional.

"PKS adalah bagian dari kesinambungan sejarah dan kelanjutan estafet perjuangan dari Partai Keadilan (PK) yang lahir dari rahim reformasi 1998. Sebagai anak kandung reformasi, PKS berkomitmen menjalankan cita-cita reformasi melalui jalan konstitusional yang bermartabat,

H. AHMAD SYAIKHU

Presiden PKS



PKS Gelar Bimtek dan Konsolidasi Nasional Aleg, **Teguhkan Komitmen Melayani Rakyat dan Dukung Pemerintahan Prabowo**

Jakarta (28/04) --- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar Bimbingan Teknis Nasional (Bimtek) dan Konsolidasi Nasional bagi seluruh anggota legislatif PKS tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota se-Indonesia. Kegiatan ini berlangsung di Jakarta dan diikuti 1.583 Aleg PKS dari berbagai daerah.

Sekretaris Jenderal DPP PKS, Habib Aboe Bakar Alhabsyi, menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalitas Aleg PKS dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran.

"Bimtek ini fokus pada penguatan peran Aleg dalam melayani rakyat, berbasis prinsip-prinsip perjuangan PKS dan aspirasi masyarakat," ujar Aboe Bakar dalam sambutannya.

Lebih lanjut, Aboe Bakar menegaskan bahwa melalui Konsolidasi Nasional ini

KONSOLIDASI NASIONAL & BIMTEKNAS

PEMERAN DEWAN & ANGGOTA FRAKSI PKS SE INDONESIA

KOKOH MELAYANI, KONSISTEN MENGABDI

diharapkan terbangun soliditas dan sinergi antara Aleg dan seluruh struktur partai di berbagai tingkatan.

"Kita ingin mengkokohkan kerja-kerja pelayanan dan pengabdian kepada rakyat secara lebih terarah dan berkesinambungan," jelasnya. Dalam kesempatan

tersebut, Aboe Bakar juga menekankan bahwa konsolidasi ini merupakan bentuk dukungan PKS terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Ia menegaskan bahwa PKS siap bersinergi dan mendukung program-program strategis pemerintahan saat ini.

"Melalui kegiatan ini, para Aleg PKS diminta melakukan penyesuaian dengan agenda pemerintahan Prabowo Subianto, sehingga tersusun rencana aksi politik yang konkret, terukur, dan sejalan dengan arah pemerintah," ujarnya.

Kegiatan ini juga diisi dengan berbagai sesi pelatihan substantif, simulasi, serta diskusi strategis untuk memperkuat kapasitas politik Aleg PKS dalam mengadvokasi kepentingan rakyat di tingkat legislatif.

Dengan tema 'Kokoh Melayani, Konsisten Mengabdikan', PKS menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah rakyat, memberikan solusi, dan berperan aktif dalam membangun bangsa.



"Melalui kegiatan ini, para Aleg PKS diminta melakukan penyesuaian dengan agenda pemerintahan Prabowo Subianto, sehingga tersusun rencana aksi politik yang konkret, terukur, dan sejalan dengan arah pemerintah,"

**HABIB ABOE
BAKAR ALHABSYI**
Anggota Komisi III DPR RI



Konsolnas dan Bimteknas FPKS,

Jazuli Juwaini Tegaskan Fraksi PKS Harus Solid, Sinergis, dan Terus Berkembang

Jakarta (28/04) --- Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini, membuka Konsolidasi Nasional dan Bimbingan Teknis Nasional (Bimteknas) Anggota Fraksi PKS se-Indonesia dengan semangat membara.

Di hadapan 1.585 anggota DPR dari tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota, Jazuli menyerukan pentingnya menjaga solidaritas, meningkatkan kapasitas diri, dan memperkuat sinergitas untuk memperjuangkan aspirasi rakyat dan membangun bangsa.

"Selamat datang para petarung tangguh. Kami bangga kepada kalian," seru Jazuli mengawali sambutannya dengan penuh semangat.

Ia menekankan bahwa pertemuan besar ini adalah momen untuk mengkokohkan barisan Fraksi PKS agar tetap kuat,

KONSOLIDASI NASIONAL & BIMTEKNAS
PERHIAN DEWAN & ANGGOTA FRAKSI PKS SE INDONESIA
KOKOH MELAYANI, KONSISTEN MENGAJADI

solid, dan tegak lurus terhadap kepemimpinan partai.

"Kokohnya barisan akan menentukan kesuksesan perjuangan kita di parlemen. Semakin kokoh dan solid barisan kita, akan semakin banyak kita melahirkan kehebatan-kehebatan yang bisa menakjubkan seluruh rakyat Republik Indonesia,"

ujarnya.

Lebih jauh, Jazuli mengingatkan seluruh anggota fraksi untuk tidak berpuas diri dengan pencapaian yang ada. Menurutnya, di tengah perubahan zaman yang begitu cepat, anggota dewan dituntut untuk terus mengembangkan kapasitas, memperkaya pengetahuan, dan meningkatkan kemampuan.

"Usia boleh tua, tapi energi, kemampuan, dan kapasitas kita harus terus berkembang. Kalau kita tidak meningkatkan kapasitas kita, kita akan didadahi oleh rakyat Republik Indonesia karena kita ketinggalan zaman," tegasnya.

Dalam membangun kekuatan politik yang efektif, Jazuli menekankan pentingnya sinergi antara fraksi pusat dan daerah. Ia menggambarkan sinergi ini seperti permainan angklung, di mana alat musik sederhana dari bambu itu menghasilkan harmoni indah berkat kerja sama yang serasi.

"Ketika irama perjuangan kita sinergi, maka akan terlihat indah. Rakyat akan tertarik," ungkapnya.

Tak hanya itu, Jazuli mengingatkan seluruh anggota bahwa mereka memiliki tugas penting sebagai penyambung lidah keberhasilan PKS kepada masyarakat.

"Semua kita adalah humas," katanya. Ia menekankan pentingnya menyebarluaskan informasi positif tentang kinerja fraksi dan kepala daerah dari



"Kokohnya barisan akan menentukan kesuksesan perjuangan kita di parlemen. Semakin kokoh dan solid barisan kita, akan semakin banyak kita melahirkan kehebatan-kehebatan yang bisa menakjubkan seluruh rakyat Republik Indonesia,

Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA

Ketua Fraksi PKS DPR RI

PKS, sebagai bagian dari upaya membangun citra partai di tengah masyarakat.

Di tengah perubahan politik nasional, Jazuli juga mengingatkan perubahan posisi PKS dari oposisi menjadi bagian dari koalisi pemerintahan.

"Sepuluh tahun yang lalu kita oposisi, sekarang kita sudah koalisi. Karena itu tidak

ada lagi anggota fraksi yang merasa masih beroposisi," tandasnya.

Ia menegaskan bahwa dukungan kepada pemerintah harus diberikan selama sejalan dengan kepentingan rakyat, namun tetap dilakukan dengan semangat kritis yang santun dan bijak.



Adang Daradjatun: Konsolnas, Bimteknas dan Milad ke-23 PKS Momentum Penting Pererat Ukhuwah

Jakarta (01/05) --- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Adang Daradjatun menyampaikan apresiasi dan dukungan atas tersele-
nggarannya Konsolidasi Nasional (Konsolnas) dan Bimbingan Teknis Nasional (Bimteknas) sekaligus memperingati Milad ke-23 PKS, yang mengusung tema 'Kokoh Melayani, Konsisten Mengabdikan' yang dilaksanakan di Hotel Bidakara, Jakarta, pada 28-30 April 2025.

sekaligus memperingati Milad ke-23 PKS, yang mengusung tema 'Kokoh Melayani, Konsisten Mengabdikan' yang dilaksanakan di Hotel Bidakara, Jakarta, pada 28-30 April 2025.

Menurut Adang, kegiatan Konsolnas dan Bimteknas yang diakhiri dengan puncak Milad ke-23 PKS ini menjadi sarana dalam memperkuat barisan dan meningkatkan kapasitas pelayanan kepada rakyat.

"Sebagai anggota DPR RI dari Fraksi PKS, saya menyampaikan pesan bahwa esensi dari Konsolnas ini adalah menjadi momentum penting untuk mempererat ukhuwah, menguatkan visi perjuangan partai dan mempertegas komitmen pelayanan terbaik kepada masyarakat," ujar Anggota Komisi III DPR RI ini.

Yang tak kalah pentingnya adalah Bimteknas, kata Adang, yang tentunya akan menjadi

bekal para peserta yang berguna untuk penguatan kapasitas kepemimpinan, strategi komunikasi publik, serta inovasi pelayanan masyarakat.

"Materi-materi tersebut diharapkan menjadi bekal yang kuat bagi seluruh anggota legislatif dan eksekutif PKS yang hadir sebagai solusi di tengah-tengah masyarakat konstituen-

nya," ujarnya.

Milad ke-23 PKS, lanjut Adang, menjadi penanda perjalanan panjang PKS dalam menjaga komitmen perjuangan.

"Usia ini mencerminkan kedewasaan, keteguhan prinsip, serta konsistensi dalam berkontribusi untuk Indonesia yang lebih baik," tegas Wakil Ketua FPKS DPR RI ini.

Dalam suasana milad ini, imbuhnya, pihaknya mengajak semua pihak meneguhkan kembali semangat untuk tetap kokoh dalam melayani rakyat dan konsisten mengabdikan demi terwujudnya cita-cita keadilan, kesejahteraan, dan kemajuan bangsa.

"Semoga dengan konsolidasi, peningkatan kapasitas, dan semangat milad ini, PKS semakin solid, meluaskan manfaat, dan terus menjadi pelayan rakyat yang terpercaya," ujar Anggota DPR RI dari Dapil DKI Jakarta III ini.

"Sebagai anggota DPR RI dari Fraksi PKS, saya menyampaikan pesan bahwa esensi dari Konsolnas ini adalah menjadi momentum penting untuk mempererat ukhuwah, menguatkan visi perjuangan partai dan mempertegas komitmen pelayanan terbaik kepada masyarakat,"

Drs. H. ADANG DARADJATUN

Anggota Komisi III DPR RI

Hadiri Konsolidasi Nasional PKS, Reni Astuti Tegaskan Konsistensi Pelayanan dan Pengabdian Rakyat

Jakarta (30/04) --- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar Konsolidasi Nasional dan Bimbingan Teknis Nasional (Bimteknas) untuk seluruh anggota legislatif PKS se-Indonesia.

Acara ini dilaksanakan di Hotel Bidakara, Jakarta, mulai Senin (28/04/2025) hingga Rabu (30/04/2025) dan dihadiri sekitar 1.585 anggota legislatif dari tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota.

Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Dapil Jawa Timur 1 (Surabaya-Sidoarjo), Reni Astuti, turut hadir dalam kegiatan akbar tersebut.

Dalam keterangannya, Reni menyatakan komitmennya untuk menjalankan arahan pimpinan PKS, yaitu kokoh melayani rakyat dan konsisten mengabdikan untuk bangsa dan negara.

Konsolidasi Nasional ini menjadi ajang penting bagi para anggota legislatif PKS untuk bersilaturahmi dan berdiskusi dengan sesama legislator dari berbagai daerah, mulai dari Aceh hingga Papua. Reni mengungkapkan rasa syukurnya atas kesempatan ini.

"Bertemu dan berdiskusi dengan rekan-rekan dari berbagai latar belakang daerah memberikan banyak wawasan baru. Ini memperkaya perspektif dalam menjalankan amanah pelayanan kepada masyarakat," ujar Reni.

Dalam acara tersebut,

para peserta juga mendapatkan arahan langsung dari Ketua Majelis Syuro PKS, Habib Dr. Salim Segaf Al-Jufri.

Reni menyambut positif pesan yang disampaikan, terutama tentang pentingnya keteguhan dalam perjuangan, penguatan komunikasi dan kolaborasi, serta menjaga persatuan bangsa di tengah berbagai tantangan nasional maupun global.

"Saya sangat sependapat dengan urgensi kolaborasi lintas sektor dan daerah, karena hanya dengan kerja sama eratlah kita bisa menghadirkan kesejahteraan yang merata bagi masyarakat," kata politisi perempuan asal Surabaya tersebut.

Lebih lanjut, Reni juga menyambut baik arahan untuk memperkuat soliditas dan sinergi antara anggota legislatif dengan seluruh struktur partai di berbagai tingkatan. Hal ini menurutnya sangat penting untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.

"Struktur Partai, Kader dan Anggota Legislatif merupakan garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu soliditas dan sinergi menjadi hal Utama yang harus terus dijaga. In Sya Allah kerja-kerja besar akan terasa ringan jika dikelola secara berjamaah.", ujar Reni

Sebagai penutup, Reni berharap Konsolidasi Nasional dan Bimteknas PKS 2025 ini



"Struktur Partai, Kader dan Anggota Legislatif merupakan garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu soliditas dan sinergi menjadi hal Utama yang harus terus dijaga. In Sya Allah kerja-kerja besar akan terasa ringan jika dikelola secara berjamaah."

RENI ASTUTI, S.Si., M.PSDM.

Anggota Komisi V DPR RI

menjadi langkah awal untuk meningkatkan sinergi pelayanan dan pengabdian seluruh anggota legislatif PKS di seluruh Indonesia.

"Semoga dari konsolidasi

ini, lahir kerja-kerja nyata yang semakin mempercepat kesejahteraan dan kemajuan masyarakat di seluruh pelosok Nusantara," tutup Reni.



image istimewa

Meity Rahmatia: Bimtek dan Konsolidasi Nasional PKS Teguhkan Kembali Visi Seluruh Aleg PKS

Jakarta (30/04) — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Majelis Permusyawaratan Perwakilan (MPR) Republik Indonesia dari Fraksi PKS, Meity Rahmatia, menghadiri bimbingan teknis (Bimtek) dan konsolidasi nasional Partai Keadilan Sejahtera di Jakarta, Selasa (28/04/2025).

Politisi yang kini berkiprah di Komisi XIII (Tiga belas) itu tampak menyatu dengan 1.583 anggota legislatif Partai Keadilan Sejahtera dari seluruh wilayah tanah air Indonesia.

Meity mengaku antusias dan mengapresiasi kegiatan yang akan berlangsung beberapa hari ke depan itu. Ditemui di sela acara, ia

“Bimtek ini, selain meningkatkan kapasitas dan profesional Aleg dalam menjalankan tugas dan fungsinya di legislasi, pengawasan dan anggaran, juga menjadi momen seluruh Aleg untuk bersilaturahmi. Harmonisasi, penyatuan visi yang sesuai cita-cita partai dalam mendukung pemerintahan yang sedang berjalan,”

**Hj. MEITY RAHMATIA,
S.Pd., S.E., M.M.**

Anggota Komisi XIII DPR RI

mengaku mendapat banyak pengetahuan dan masukan terkait perannya di parlemen.

“Sebagai Aleg yang baru berkiprah di DPR RI, saya tentu menyambut baik kegiatan ini. Saya mendapat banyak pengetahuan dan masukan dari para pembicara selama kegiatan berlangsung,” ungkapnya.

Ia menambahkan, selain materi Bimtek, baginya, kegiatan ini adalah momentum bersilaturahmi dengan seluruh Aleg PKS yang berasal dari berbagai wilayah Indonesia. Juga, sebagai ruang penyatuan dan penguatan kembali visi seluruh aleg PKS yang sejalan dengan cita-cita partai bercorak Islam Nasionalis tersebut.

“Bimtek ini, selain meningkatkan kapasitas dan

profesional Aleg dalam menjalankan tugas dan fungsinya di legislasi, pengawasan dan anggaran, juga menjadi momen seluruh Aleg untuk bersilaturahmi. Harmonisasi, penyatuan visi yang sesuai cita-cita partai dalam mendukung pemerintahan yang sedang berjalan,” jelas Meity yang tampil dengan jilbab orange khas PKS.

Meity tak melewatkan kesempatan ini bersua dan berfoto dengan para pimpinan dan petinggi PKS.

Hadir dalam acara pimpinan Dewan Syuro PKS, Habib Salim Segaf Al Jufri, Presiden PKS, KH Ahmad Syaikh, Sekjend Habib Aboe Bakar Alhabsy, dan lain-lain.



Meitri Citra Wardani: Konsolnas Momentum Perkuat Soliditas dan Ciptakan Terobosan bagi Kemaslahatan Rakyat

Jakarta (30/04) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Meitri Citra Wardani, menegaskan pentingnya menjaga konsistensi dan semangat melayani masyarakat di kalangan anggota legislatif PKS.

Hal itu disampaikan dalam agenda Konsolidasi Nasional dan Bimbingan Teknis Nasional (Bimteknas) PKS se-Indonesia yang diselenggarakan oleh DPP PKS di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (28/04/2025).

Acara yang dihadiri oleh 1.853 anggota legislatif PKS dari seluruh Indonesia ini bertujuan memperkuat kapasitas teknis dan ideologis anggota PKS di ranah legislatif dalam mengawal amanah rakyat. Selain pembekalan teknis, peserta juga menunjukkan solidaritas terhadap perjuangan rakyat Palestina dengan mengenakan syal khas Palestina sebagai simbol perlawanan terhadap penajahan dan agresi Israel yang masih berlangsung.

“PKS hadir di tengah

masyarakat untuk menjadi teladan dalam menjaga konsistensi pelayanan kepada rakyat dan membela nilai-nilai yang menjadi aspirasi publik. Momentum konsolidasi ini menjadi sarana penting untuk saling bertukar pikiran, memperkuat soliditas, serta mendorong lahirnya berbagai terobosan untuk kemaslahatan masyarakat,” jelas Meitri.

Meitri juga mendukung pesan Ketua Majelis Syura PKS, Habib Salim Segaf Aljufri, yang menekankan pentingnya kolaborasi lintas elemen bangsa, baik dengan partai politik lain, organisasi masyarakat, akademisi, maupun sektor swasta guna menghasilkan solusi konkret terhadap persoalan rakyat.

“Di tengah tantangan eko-

nomi dan sosial hari ini, kolaborasi adalah kunci. Sebab, negeri ini terlalu besar untuk diurus sendirian. Kita perlu gotong-royong lintas sektor demi mendorong terciptanya keadilan sosial serta pemerataan kesejahteraan,” ungkap Meitri.

Sebagai salah satu anggota DPR termuda, Meitri mengapresiasi peran PKS yang telah membantunya tumbuh menjadi legislator yang berani mengambil peran strategis. Dia menyebut PKS sebagai rumah inkubasi kepemimpinan bagi anak muda di ranah politik.

“PKS memberikan ruang nyata bagi anak muda untuk beraktualisasi. Banyaknya legislator muda yang hadir di acara ini menjadi bukti komitmen PKS dalam proses regenerasi politik. Di sinilah kami belajar, berdiskusi, dan bertumbuh bersama. Inshaa Allah, PKS telah berhasil membuktikan komitmennya untuk mendorong lahirnya pemimpin yang visioner, mengakar, dan menjunjung tinggi etika politik,” pungkas Meitri.



“PKS hadir di tengah masyarakat untuk menjadi teladan dalam menjaga konsistensi pelayanan kepada rakyat dan membela nilai-nilai yang menjadi aspirasi publik. Momentum konsolidasi ini menjadi sarana penting untuk saling bertukar pikiran, memperkuat soliditas, serta mendorong lahirnya berbagai terobosan untuk kemaslahatan masyarakat,”

**Hj. MEITRI CITRA
WARDANI, S.H.**

Anggota Komisi XI DPR RI

Fraksi PKS Dukung Presiden Prabowo Selamatkan Rakyat Palestina dan Usir Penjajah Israel

Jakarta (11/04) — Fraksi PKS menyambut baik dan mendukung langkah konkrit Presiden Prabowo untuk menyelamatkan nyawa rakyat Palestina dari kebiadaban Israel dengan mengobati mereka yang terluka dengan perawatan dan pelayanan medis yang layak dan tuntas.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini merespon pertanyaan sejumlah media atas rencana Presiden Prabowo untuk mengevakuasi dan mengobati rakyat Palestina. Menurut Anggota Komisi I DPR, rencana Presiden ini menunjukkan solidaritas kemanusiaan bangsa Indonesia, bahwa kita tidak tinggal diam melihat korban rakyat sipil, bayi, anak-anak, perempuan, dan orang tua tanpa berbuat apa-apa. Kita memilih untuk mengevakuasi dan mengobati mereka yang bisa diselamatkan karena semua

rumah sakit dan layanan medis sudah dihancurkan oleh Israel. "Kita sepakati dulu prinsipnya bahwa harus ada aksi nyata untuk menyelamatkan korban jiwa rakyat Palestina. Ini adalah upaya darurat untuk menyelamatkan korban sipil dengan evakuasi dan ini bukan relokasi warga Palestina dari tanah tinggal mereka. Karena faktanya di Gaza dan tempat-tempat pengungsian tidak ada lagi fasilitas medis, rumah sakit, dokter, obat-obatan. Semuanya sudah dihancurkan oleh kebiadaban penjajah Israel," tegas Jazuli.

Secara teknis, lanjut Wakil Tetap Parlemen Dunia (IPU) Untuk Urusan Timur Tengah ini, upaya penyelamatan itu harus dilakukan dengan melibatkan persetujuan dan kerjasama dengan berbagai pihak yang peduli dengan kemanusiaan rakyat Palestina mulai dari otoritas Palestina, negara-negara kawasan hingga komunitas internasional. Termasuk hal-hal teknis seperti skema penanganan, lokasi, dan fasilitas perawatannya yang memadai dan representatif.

"Namun hal-hal teknis itu tidak boleh mengesampingkan tindakan nyata, cepat, dan tepat dalam menyelamatkan nyawa rakyat Palestina yang bisa diselamatkan segera atas nama kemanusiaan. Di sinilah kita mengapresiasi langkah strategis Presiden Prabowo," ungkapnya.

Pada saat yang sama, Fraksi PKS bersama-sama Pemerintahan dan seluruh rakyat Indonesia konsisten berada di belakang rakyat dan pejuang Palestina dalam merebut kemerdekaan dari penjajah Israel. Sampai kapan pun kita tidak akan rela rakyat Palestina diambil tanah dan wilayahnya oleh penjajah Israel.

Indonesia baik pemerintah, parlemen, maupun rakyatnya terus mendukung para pejuang dan rakyat Palestina dengan seluruh kemampuan yang kita punya baik melalui bantuan moril, materil, maupun melalui diplomasi global yang tidak pernah absen mengangkat nasib



Ini adalah upaya darurat untuk menyelamatkan korban sipil dengan evakuasi dan ini bukan relokasi warga Palestina dari tanah tinggal mereka. Karena faktanya di Gaza dan tempat-tempat pengungsian tidak ada lagi fasilitas medis, rumah sakit, dokter, obat-obatan.

Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA

Ketua Fraksi PKS DPR RI

Palestina, baik secara bilateral maupun melalui forum-forum multilateral.

"Kita akan terus menggalang kekuatan global untuk menghentikan penjajahan dan mengusir Israel dari Palestina, sehingga pada saatnya seluruh

rakyat Palestina merasakan kemerdekaan dan kedaulatan di tanah mereka sendiri. Ini adalah amanat konstitusi sekaligus hutang sejarah bangsa Indonesia yang akan kita perjuangkan sampai Palestina merdeka," pungkas Jazuli.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

Kreatif Atraktif Substantif



Dr. H. Jazuli Juwaini, M.A.
Ketua Fraksi PKS DPR RI



SOSIAL MEDIA
Fraksi PKS DPR RI



Hj. Ledia Hanifa A., S.Si., M.Psi.T.
Sekretaris Fraksi PKS DPR RI



Jazuli Juwaini Soroti Tarif AS dan Kekosongan Dubes RI untuk AS

Jakarta (11/04) --- Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) Jazuli Juwaini memberikan tanggapan kritis terhadap kebijakan tarif yang diberlakukan Amerika Serikat terhadap produk Indonesia serta kekosongan posisi Duta Besar RI untuk AS yang telah berlangsung hampir dua tahun.

Pernyataan ini disampaikan Jazuli saat mengikuti Sidang Parlemen Dunia ke-150 (Inter-Parliamentary Union/IPU) yang berlangsung di Tashkent, Uzbekistan, 5-9 April 2025.

Terkait kebijakan tarif AS yang diberlakukan oleh pemerintahan Presiden Donald Trump, Jazuli menekankan pentingnya menyikapi langkah tersebut secara proporsional.

Ia mengingatkan bahwa kebijakan ini tidak hanya berdampak pada Indonesia, tetapi juga memicu ketidaknyamanan di dalam negeri Amerika sendiri, termasuk kalangan pengusaha.

"Kebijakan Trump ini bu-

kan hanya menimpa Indonesia. Bahkan, pengusaha-pengusaha dalam negeri Amerika pun juga tidak nyaman yang berurusan dengan beberapa komoditi dari Indonesia. Kita harus menyikapinya secara tenang, tidak emosional," ujar Jazuli Kamis (10/04/2025).

Ia pun mendukung langkah pemerintah Indonesia yang lebih memilih jalur negosiasi dibanding konfrontasi terbuka dalam merespons kebijakan tersebut.

"Saya kira ini langkah yang arif dan bijak. Intinya bagaimana dari kebijakan Presiden Amerika yang tidak bersahabat

ini, kita tetap mengambil keuntungan ekonomi maksimal bagi bangsa dan negara Indonesia," tambahnya.

Politisi Fraksi PKS tersebut juga menekankan pentingnya diversifikasi mitra dagang dan diplomasi ekonomi yang tidak semata-mata bergantung pada Amerika Serikat.

"Kita bukan hanya berurusan dengan Amerika. Kita juga harus membuka peluang kerja sama ekonomi dengan negara-negara lain yang bisa dioptimalkan demi keuntungan bangsa," tandasnya.

Terkait kekosongan posisi Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat yang sudah berlangsung hampir dua tahun, Jazuli mengakui pentingnya peran Dubes, namun menilai hal itu seharusnya tidak menjadi penghambat utama dalam diplomasi Indonesia.

"Keberadaan Duta Besar memang penting, tapi bukan satu-satunya faktor dalam melakukan komunikasi dan diplomasi. Kita tetap bisa melakukan lobby dan negosiasi strategis, meski posisi itu belum terisi," tegasnya.

Meski demikian, ia berharap pemerintah segera menyelesaikan persoalan ini agar posisi Dubes RI untuk AS segera terisi demi memperkuat hubungan bilateral.

"Tentu kita berharap posisi Dubes segera terisi. Tapi selama itu belum terjadi, tidak boleh jadi alasan untuk berhenti



"Keberadaan Duta Besar memang penting, tapi bukan satu-satunya faktor dalam melakukan komunikasi dan diplomasi. Kita tetap bisa melakukan lobby dan negosiasi strategis, meski posisi itu belum terisi,"

Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA

Ketua Fraksi PKS DPR RI

melakukan diplomasi yang membawa maslahat bagi negara dan bangsa," pungkas Jazuli yang juga merupakan Anggota Komisi I DPR RI tersebut.

Sidang IPU ke-150 di

Tashkent ini menjadi momen penting bagi parlemen dari berbagai negara untuk membahas isu-isu global, termasuk tantangan geopolitik dan kerja sama multilateral.



image istimewa

Ahmad Heryawan Ajak Umat Islam Taati Seruan Ulama Tentang Genosida Zionis di Jalur Gaza

Jakarta (19/04) — Wakil Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS, Ahmad Heryawan, mengajak seluruh umat Islam Indonesia dan masyarakat luas untuk menaati dan menjadikan pernyataan serta seruan para ulama sebagai pedoman moral dalam menyikapi tragedi kemanusiaan yang terjadi di Jalur Gaza, Palestina.

Tentunya aksi kekerasan dan agresi militer yang terus dilakukan oleh rezim Zionis Israel terhadap rakyat Palestina, khususnya di Jalur Gaza, telah melampaui batas kemanusiaan dan dapat dikategorikan sebagai genosida.

"Ulama adalah suara hati nurani umat Islam. Ketika para ulama menyatakan dan menyerukan bahwa yang terjadi di Ga-

za adalah bentuk nyata dari genosida dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), maka umat Islam sudah sepatutnya menjadikan pernyataan itu sebagai panggilan moral dan tanggung jawab bersama." ujar Kang Aher kepada para awak media.

Lebih jauh, Anggota F-PKS DPR RI Periode 2024-2029 ini menekankan bahwa pentingnya solidaritas kemanusiaan dan kesatuan umat dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina.

Menurutnya, pernyataan para ulama lintas negara menjadi bukti bahwa dunia Islam tidak tinggal diam terhadap penderitaan rakyat Gaza.

"Ini bukan semata isu agama, tapi isu kemanusiaan global. Ketika anak-anak dan perempuan dibantai, rumah

"Ini bukan semata isu agama, tapi isu kemanusiaan global. Ketika anak-anak dan perempuan dibantai, rumah sakit dihancurkan, dan bantuan kemanusiaan dihalangi, maka diam adalah pengkhianatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri,"

**Dr. H. AHMAD
HERYAWAN, Lc., M.Si.**

Wakil Ketua Komisi I DPR RI

sakit dihancurkan, dan bantuan kemanusiaan dihalangi, maka diam adalah pengkhianatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri," tegas Wakil Ketua Majelis Syuro DPP PKS ini.

Terakhir, Mantan Gubernur Jawa Barat dua periode ini mendorong pemerintah Indonesia untuk terus bersikap tegas dan vokal di forum-forum internasional, serta memperkuat dukungan diplomatik, kemanusiaan, dan politik terhadap Palestina.

"Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, dan sebagai bangsa yang menjunjung tinggi keadilan, Indonesia tidak boleh netral dalam menghadapi kezaliman. Kita harus berpihak kepada korban dan menentang penjajahan dalam bentuk apa pun," demikian Kang Aher menutup wawancara.



Dialog Presiden Prabowo dengan Pimpinan Media,

Habib Idrus: Komunikasi Terbuka Pemimpin, Pilar Demokrasi Kuat

Jakarta (09/04) --- Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS, Idrus Salim Al Jufri mengapresiasi langkah dan sikap Presiden Prabowo Subianto yang menggelar dialog langsung dengan tujuh pemimpin redaksi media nasional serta seorang presenter televisi pada 6 April 2025.

Menurut Habib Idrus, apa yang dilakukan Presiden Prabowo sangat patut diapresiasi sebagai bentuk nyata dari kepemimpinan yang komunikatif dan terbuka.

"Dalam situasi sosial-politik yang dinamis seperti hari ini, inisiatif tersebut tidak hanya penting, tetapi juga strategis," ungkap Anggota DPR RI dari Dapil Banten III ini.

Pertemuan yang berlangsung di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang itu, imbuhnya, bukan sekadar seremoni komunikasi biasa, akan tetapi merupakan refleksi dari kesadaran Presiden akan pentingnya transparansi dan

tanggung jawab publik.

"Bahwa dalam era informasi yang cepat dan kompleks, kebenaran tak cukup disuarakan oleh pemerintah semata, tetapi juga perlu dipahami dan disampaikan oleh media secara utuh," ujar Habibnya Tangerang ini.

Sebagai Anggota Komisi I DPR RI yang membidangi urusan komunikasi, informatika, pertahanan dan luar negeri, pihaknya memandang bahwa forum semacam ini adalah ruang rekonsiliasi narasi antara negara dan rakyat.

"Komunikasi bukan sekadar soal menyampaikan, tetapi juga mendengar, memahami, dan menjawab.

Dengan menghadirkan para pemimpin redaksi dari berbagai platform media, Presiden tidak hanya menjawab isu, tetapi mengajak media menjadi mitra dalam membentuk persepsi publik yang sehat dan objektif," pungkasnya.

Dalam pertemuan itu, lanjut Habib Idrus, Presiden menjelaskan berbagai kebijakan prioritas pemerintah, seperti efisiensi belanja negara dan program Makan Bergizi Gratis (MBG), dengan gaya yang lugas dan terbuka.

"Langkah ini patut menjadi

presiden baru dalam pola komunikasi kenegaraan, yang tidak lagi bertumpu pada formalitas birokratik, melainkan mengedepankan dialog dua arah yang dinamis dan membangun kepercayaan," terang Habib Idrus.

Masyarakat, kata Habib Idrus, tentu semakin cerdas dalam mengakses dan memilah informasi. Namun di tengah derasnya banjir informasi dan semakin liarnya perdebatan digital, presiden yang hadir sebagai narasumber utama bangsa adalah sebuah bentuk kepemimpinan yang menyatukan, bukan menghindar.

"Saya percaya, komunikasi yang baik bukan hanya menjerihkan informasi, tetapi juga menguatkan demokrasi. Ketika pemimpin negara menunjukkan keterbukaan, maka rakyat merasa didengar. Ketika media diberi ruang untuk bertanya, maka publik memperoleh narasi yang seimbang," jelasnya.

Oleh karena itu, lanjut Habib Idrus, pihaknya mendukung sepenuhnya pendekatan yang dilakukan Presiden Prabowo.

"Dialog yang intensif dengan media harus menjadi bagian dari agenda rutin kenegaraan, bukan hanya saat ada tekanan isu, tetapi sebagai prinsip dasar pemerintahan yang demokratis dan partisipatif," imbuhnya.

"Mari kita bangun sinergi antara pemerintah, parlemen, dan media dalam bingkai komunikasi publik yang jujur, solutif, dan menjunjung tinggi etika. Karena di era keterbukaan ini, kepercayaan publik adalah kekuatan utama pemimpin, dan komunikasi adalah jembatan terdekat menuju legitimasi," tutup Habib Idrus.

"Dialog yang intensif dengan media harus menjadi bagian dari agenda rutin kenegaraan, bukan hanya saat ada tekanan isu, tetapi sebagai prinsip dasar pemerintahan yang demokratis dan partisipatif,

**HABIB IDRUS SALIM
ALJUFRI, Lc., M.B.A.**

Anggota Komisi I DPR RI





image istimewa

Aleg PKS Sukamta Dukung Rencana Pemerintah Evakuasi Korban Warga Gaza Palestina

Jakarta (09/04) — Presiden Prabowo menyatakan kesiapan pemerintah Indonesia untuk mengevakuasi korban luka dan anak-anak yatim piatu Palestina korban genosida Israel di Gaza.

Hal ini disampaikan sebelum agenda kunjungan kenegaraan ke Turki dan beberapa negara timur tengah pada Rabu, 9 April 2025.

Menanggapi pernyataan presiden tersebut, Anggota

Komisi I DPR RI, Sukamta menyatakan dukungannya dan berharap evakuasi korban luka dan anak-anak yatim piatu Palestina bisa segera dilaksanakan.

"Setelah Israel melanggar secara sepihak perjanjian gencatan senjata, pengeboman terus dilakukan bahkan ditargetkan ke tenda-tenda pengungsian, petugas kemanusiaan dan wartawan. Kondisi di Gaza yang dapat kita saksikan melalui foto dan video yang beredar sangat mengerikan. Korban kembali berjatuhan, sementara sebagian besar rumah sakit hancur. Maka sangat penting untuk bisa dilakukan segera evakuasi terutama korban luka dan juga anak-anak yatim piatu," ujarnya.

Menurut Sukamta evakuasi korban luka dan anak-anak yatim Palestina ini perlu diupayakan oleh banyak negara

termasuk Indonesia, mengingat jumlahnya yang sangat besar.

"Ada sekitar 120 ribu korban luka-luka, lebih dari 38 ribu anak yatim. Ini jumlah yang sangat besar. Perlu ada bantuan komunitas internasional untuk ikut membantu warga Gaza," ungkap Sukamta.

Wakil Ketua Fraksi PKS ini menyatakan langkah evakuasi korban luka dan anak yatim ini beda dengan ide gila Trump untuk memindahkan warga Gaza. Menurutnya evakuasi ini hanya bersifat sementara untuk membantu pemulihan luka dan juga healing trauma. Jika kondisi di Gaza sudah membaik, mereka akan dikembalikan ke tanah airnya.

Sukamta berharap dalam kunjungan kenegaraan Prabowo ke Turki, Uni Emirat Arab, Mesir, Qatar, dan Yordania 9-15 April, dapat menghadirkan solusi konkret penghentian segera genosida yang dilakukan Israel.

"Ada sekitar 120 ribu korban luka-luka, lebih dari 38 ribu anak yatim. Ini jumlah yang sangat besar. Perlu ada bantuan komunitas internasional untuk ikut membantu warga Gaza,"

H. SUKAMTA, Ph.D

Anggota Komisi I DPR RI



image istimewa

Rahmat Saleh Datangi KPU Sumbar Jelang PSU Pilkada Pasaman

Padang (19/04) --- Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi, Rahmat Saleh, menegaskan bahwa pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pilkada Pasaman yang akan segera digelar harus menjadi yang terakhir.

Hal itu disampaikan saat mengunjungi Kantor KPU Sumatera Barat di Kota Padang, Jumat (18/04/2025).

Menurut Rahmat, PSU yang terjadi akibat pelanggaran prosedur atau sengketa harus diantisipasi secara serius oleh seluruh pihak, terutama penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Dia menilai, pelaksanaan PSU tidak hanya menguras anggaran negara, namun juga bisa menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap proses demokrasi.

"PSU ini mahal, baik secara finansial maupun secara sosial-politik. Jangan sampai setiap pilkada berakhir dengan PSU, apalagi jika sampai terjadi sengketa lagi di Mahkamah Konstitusi," ujarnya.

Rahmat mengingatkan agar KPU dapat lebih proaktif dalam mengantisipasi potensi pelanggaran sejak awal proses pemilu.

Ia menyebut, pengawasan dan koordinasi antarlembaga harus diperkuat untuk mencegah kesalahan prosedural yang bisa merugikan semua pihak.

"Kita dorong KPU untuk lebih aktif dan jeli melihat potensi pelanggaran di lapangan. Jangan menunggu ada masalah baru bertindak. Ini harus diantisipasi sejak tahapan awal," katanya.

Rahmat menekankan pentingnya asas kejujuran dan keadilan dalam penyelenggaraan PSU Pilkada Pasaman.

"Pilkada adalah fondasi demokrasi. Utamakan jujur dan adil," tambahnya.

Tak hanya kepada penyelenggara, Rahmat juga menyampaikan himbauan kepada Masyarakat Pasaman untuk menggunakan hak pilihnya dalam PSU mendatang.

Dia menyebut partisipasi pemilih menjadi kunci legitimasi dari hasil pilkada.

"Masyarakat jangan apatis. Gunakan hak pilih, jangan biarkan suara Anda disalahgunakan. PSU ini momentum penting untuk menentukan masa depan daerah," jelasnya.

Sementara itu, Ketua KPU Sumbar, Surya Eftrimen, menyampaikan pihaknya

Rahmat Saleh Datangi KPU Sumbar Jelang PSU Pilkada Pasaman

« SEBELUMNYA

berkomitmen penuh dalam menyelesaikan pelaksanaan PSU di Kabupaten Pasaman.

Dia mengakui, tantangan dalam pelaksanaan PSU cukup besar, namun upaya secara maksimal dilakukan agar berjalan tanpa pelanggaran.

“Kami akan melakukan pengawasan semaksimal mungkin. Setiap tahapan kami pantau dengan sangat hati-hati. Ini bentuk tanggung jawab kami kepada publik,” kata Surya.

Dia juga menyampaikan apresiasi terhadap perhatian Komisi II DPR RI yang terus mengawal proses demokrasi di daerah.

Menurutnya, sinergi antara penyelenggara pemilu dan legislatif sangat penting untuk menjaga integritas pilkada.

“Kami mengapresiasi langkah dan perhatian dari Komisi II. Ini menjadi penyemangat bagi kami untuk bekerja lebih baik dan lebih profesional,” ungkapnya.

Selain itu, Surya meny-

ebut, KPU Sumbar telah menyiapkan langkah-langkah antisipatif, termasuk kerja sama erat dengan Bawaslu serta aparat keamanan.

Ia berharap, dengan upaya maksimal tersebut, pelaksanaan PSU dapat berjalan lancar dan tidak menimbulkan sengketa lanjutan.

“Kita belajar dari pengalaman sebelumnya. PSU ini harus dijadikan titik balik agar kedepan tidak perlu ada pemungutan ulang lagi,” ujar Surya.

Turut hadir Komisioner KPU Sumbar lainnya, Ory Sativa Syakban, Medo Patria, Jons Menedi dan Hamdan.



Sinergi antara penyelenggara pemilu dan legislatif sangat penting untuk menjaga integritas pilkada. Kami mengapresiasi langkah dan perhatian dari Komisi II. Ini menjadi penyemangat bagi kami untuk bekerja lebih baik dan lebih profesional,”

**H. RAHMAT SALEH,
S.Farm., M.I.P.**

Anggota Komisi II DPR RI



Korupsi Dana Desa Untuk Judi, Ateng Sutisna: Copot dan Tindak Tegas!

Jakarta (17/04) — Anggota Komisi II DPR RI Ateng Sutisna menyoroti kasus dugaan korupsi dana desa yang melibatkan Sekretaris Desa (Sekdes) Cipaku, Kecamatan Cipaku, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat.

Sekdes Cipaku diduga menyalahgunakan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.500 juta untuk bermain judi slot dan togel. Hal ini diakui dalam rapat bersama kepala desa dan unsur Muspika.

Kasus ini telah dilaporkan oleh warga ke aparat penegak hukum (APH) setelah aksi protes, dan saat ini sedang ditangani oleh Inspektorat Majalengka.

Ateng menyatakan bahwa kejadian ini adalah cermin daruratnya tata kelola dana desa serta makin meluasnya bahaya judi online yang bahkan menasar aparat negara.

"Ini bukan hanya soal penyimpangan anggaran, ini penghinaan terhadap amanat rakyat. Sekdes adalah ASN, harusnya menjadi teladan.

Kalau terbukti, harus segera dicopot, diproses hukum, dan dana yang diselewengkan wajib dikembalikan," tegasnya.

Lebih lanjut, Ateng menyampaikan sejumlah langkah konkret yang perlu segera diambil pemerintah, khususnya oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Desa seperti pemberian Sanksi Tegas untuk Efek Jera berupa pemberhentian sementara bagi pelaku, proses hukum yang transparan, serta pengembalian dana yang disalahgunakan.

"Jangan dibiarkan ini jadi preseden buruk," katanya.

Ia kemudian mendorong Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa melalui pelatihan keuangan desa secara rutin, sertifikasi operator pengelola dana desa,

hingga kampanye anti judi online di tingkat akar rumput.

"Banyak aparat desa tidak paham risiko pengelolaan anggaran. Literasi keuangan mereka harus ditingkatkan," ujarnya.

Ia juga menambahkan perlunya audit rutin dan insidental harus digencarkan oleh Kemendagri dan Kemendes, termasuk pembukaan data ADD kepada publik sebagai bagian dari transparansi.

Anggota DPR RI Dapil Jawa Barat IX tersebut juga menilai regulasi pengelolaan dana desa perlu diperbarui agar lebih ketat secara teknis serta memperluas kewenangan pengawasan oleh BPD dan partisipasi warga.

Ia lalu mengusulkan penggunaan teknologi digital seperti aplikasi pemantauan anggaran desa atau sistem peringatan dini terhadap transaksi mencurigakan.

"Teknologi bisa jadi alat cegah dini. Dana desa ini besar nilainya, jadi jangan hanya pakai sistem manual," kata Ateng.

Sebagai penutup, Anggota DPR RI dari Fraksi PKS tersebut menyoroti bahwa kasus ini menjadi bukti nyata daruratnya masalah judi online di Indonesia.

Ia mendesak pemerintah untuk tidak hanya fokus pada pemberantasan judi dari sisi masyarakat, tetapi juga memperkuat pengawasan internal terhadap aparat negara.

"Indonesia sudah darurat judi online. Ini bukan hanya masalah sosial, tapi sudah



sejumlah langkah konkret yang perlu segera diambil pemerintah, khususnya oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Desa seperti pemberian Sanksi Tegas untuk Efek Jera berupa pemberhentian sementara bagi pelaku, proses hukum yang transparan, serta pengembalian dana yang disalahgunakan "Jangan dibiarkan ini jadi preseden buruk,"

Ir. H. ATENG SUTISNA

Anggota Komisi II DPR RI

masuk ke jantung pemerintahan desa. Kita butuh ketegasan

dan komitmen bersama untuk memberantasnya," pungkasnya



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
Kreatif Atraktif Substantif



*Selamat &
Sukses*

Dr. H. Jazuli Juwaini, MA

Ketua Fraksi PKS DPR RI

*Yang Telah Dipilih dan Ditetapkan Oleh Sidang
Umum Parlemen Dunia (IPU) ke-150 Sebagai*

****Wakil Tetap Parlemen Dunia
Untuk Urusan Timur Tengah****

Periode 2025-2029



image istimewa

Habib Aboe: Pemberantasan Korupsi Tak Boleh Timbulkan Kasus Korupsi Baru

Jakarta (15/04) — Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS Aboebakar Alhabsyi merespon soal penetapan empat hakim sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap oleh Kejaksaan Agung.

Menurut pria yang akrab disapa Habib Aboe, kasus tersebut merupakan tamparan keras bagi integritas sistem peradilan di Indonesia.

Keempat hakim tersebut adalah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Muhammad

Arif Nuryanta, serta tiga hakim lainnya: Djuyanto, Agam Syarif Baharuddin, dan Ali Muhtarom. Mereka diduga terlibat dalam praktik suap terkait penanganan perkara korupsi ekspor crude palm oil (CPO).

Kemudian Aboebakar Alhabsyi, menyatakan keprihatinannya atas kejadian ini.

"Mafia peradilan adalah ancaman serius yang merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum kita," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa praktik semacam ini tidak hanya mencoreng wajah peradilan, tetapi juga berpotensi menurunkan kepercayaan investor terhadap kepastian hukum di Indonesia.

Habib Aboe menegaskan dukungannya terhadap langkah Kejaksaan Agung dalam membongkar praktik jual beli putusan pengadilan.

"Saya mendukung penuh upaya Kejaksaan untuk membersihkan institusi peradilan dari oknum-oknum yang mencederai keadilan," tegasnya.

"Saya mendukung penuh upaya Kejaksaan untuk membersihkan institusi peradilan dari oknum-oknum yang mencederai keadilan,"

HABIB ABOE BAKAR ALHABSYI

Anggota Komisi III DPR RI

Lebih lanjut, ia menyerahkan Mahkamah Agung untuk memperkuat pembinaan dan pengawasan internal di jajarannya.

"Mahkamah Agung perlu melakukan evaluasi menyeluruh dan memperketat pengawasan terhadap para hakim," katanya.

Komisi Yudisial juga diminta untuk berperan aktif dalam mengawasi kinerja hakim-hakim yang sedang menjalankan tugasnya.

"Ini adalah preseden buruk. Penanganan kasus korupsi yang justru menimbulkan korupsi baru menunjukkan adanya kelemahan sistemik yang harus segera diperbaiki," tambahnya.

Habib Aboe juga mengingatkan bahwa jika negara kalah melawan mafia peradilan, maka itu adalah hal besar.

"Kita tidak boleh kalah oleh mafia. Negara harus menunjukkan ketegasan dan komitmen dalam memberantas praktik-praktik korup yang merusak sendi-sendi hukum dan keadilan," pungkasnya.



image istimewa

Komisi III FPKS Adang Daradjatun Apresiasi Kinerja Aparat Penegak Hukum dalam Pemberantasan Tipikor

Jakarta (19/04) — Anggota DPR RI Komisi III Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Adang Daradjatun, menyampaikan apresiasinya terhadap kinerja Aparat Penegak Hukum (APH),

khususnya dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dalam pernyataannya, Adang menggarisbawahi pentingnya capaian dalam penegakan hukum terhadap

Tipikor sebagai langkah konkret dalam menjaga kepercayaan publik serta integritas institusi negara.

Ia menilai bahwa upaya-upaya penindakan terhadap praktik korupsi perlu terus diperkuat dengan dukungan politik, anggaran dan pengawasan yang konsisten dari DPR.

“Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang merusak sistem dan tatanan bernegara. Kami memberikan apresiasi atas capaian yang telah dilakukan aparat penegak hukum, namun upaya ini tidak boleh berhenti sampai di sini,” ujar Adang.

Lebih lanjut, Adang juga menyoroti dua isu krusial lainnya yang dinilai tak kalah penting, yaitu peredaran narkoba dan kejahatan siber yang semakin kompleks.

“Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang merusak sistem dan tatanan bernegara. Kami memberikan apresiasi atas capaian yang telah dilakukan aparat penegak hukum, namun upaya ini tidak boleh berhenti sampai di sini,”

Drs. H. ADANG DARADJATUN

Anggota Komisi III DPR RI

Menurutnya, kedua bentuk kejahatan ini juga memerlukan perhatian serius karena menyangkut masa depan generasi muda dan keamanan nasional.

“Masa Sidang III ini menjadi momentum penting bagi Komisi III untuk menjalankan fungsi pengawasan secara optimal, tidak hanya terhadap isu korupsi, tetapi juga terhadap penanganan narkoba dan kejahatan siber yang terus berkembang,” tambahnya.

Komisi III DPR RI berkomitmen untuk terus mendorong penguatan institusi penegak hukum serta memastikan bahwa strategi dan kebijakan yang diambil dapat menjawab tantangan kejahatan di era digital dan globalisasi saat ini.



image istimewa

Aleg PKS Riyono Caping: Kebijakan Non Kuota Prabowo, Menteri Harus Sigap Menindaklanjuti

Jakarta (15/04) — Kebijakan Prabowo untuk menerapkan non kuota dalam impor bagi produk yang memang belum mampu di produksi dalam negeri.

Artinya kebijakan ini memberikan ruang yang luas buat pemain lokal dan kecil bisa melakukan impor untuk meningkatkan kapasitas usaha mereka.

“Kecepatan dan ketepatan menerjemahkan kebijakan Presiden sangat penting untuk memberikan perlindungan kepada petani, nelayan dan juga produk lokal yang sdh eksis tanpa adanya produk impor

RIYONO, S.Kel., M.Si.

Anggota Komisi IV DPR RI

“Kebijakan Prabowo tentang non kuota ini memberikan ruang keadilan dan kebersamaan untuk usaha kecil mewujudkan asta cita nasional, kebijakan ini harus di sambut oleh semua pihak” papar Riyono anggota komisi IV DPR FPKS

Melihat masa pemerintahan Presiden Prabowo yang sedang menata dan meletakkan dasar ekonomi kerakyatan saat ini meminta semua pembantunya sigap dan cepat serta akurat dalam menjabarkan kebijakan Presiden.

Menurut Presiden, kebijakan ini merupakan bagian dari upaya strategis pemerintah untuk merampingkan birokrasi serta memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha. Selain itu, Presiden juga menekankan pentingnya menciptakan ekosistem yang mendukung

penciptaan lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

“Kecepatan dan ketepatan menerjemahkan kebijakan Presiden sangat penting untuk memberikan perlindungan kepada petani, nelayan dan juga produk lokal yang sdh eksis tanpa adanya produk impor” tambah Riyono

Menurut Riyono kebijakan ini tepat untuk menghilangkan praktek memburu rente impor serta kartel yang sering merugikan Indonesia dengan nilai trilyunan. Bahkan jangan sampai apa yang di putuskan Presiden menteri tidak siap menerjemahkan.

“Menteri jangan sampai tidak siap menerjemahkan keputusan Prabowo, kebijakan yang bagus tapi teknis tidak bisa diterjemahkan akan membuat kerugian bagi Presiden” tutup Riyono.



image istimewa

Pimpin Kunker Komisi IV DPR RI ke Sumut, Abdul Kharis Awasi Stok dan Penyerapan Gabah

Medan (11/04) — Wakil Ketua Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Abdul Kharis Almasyhari memimpin langsung kunjungan kerja reses tim Komisi IV DPR RI ke Provinsi Sumatera Utara,

dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan sektor pangan nasional.

Dalam kunjungan tersebut, Abdul Kharis menegaskan bahwa ketersediaan beras, baik

di tingkat nasional maupun di wilayah Sumatera Utara, saat ini berada dalam kondisi aman dan terkendali.

Kesimpulan ini didapat setelah tim Komisi IV melakukan dialog dan koordinasi langsung dengan Perum Bulog serta sejumlah pemangku kebijakan di daerah.

“Kami melihat distribusi dan stok beras masih dalam kategori aman. Ini penting untuk menjamin keterjangkauan pangan masyarakat dan mendukung kestabilan harga di pasar,” ujar Abdul Kharis

Politisi asal Daerah Pemilihan Jawa Tengah V ini juga mengapresiasi upaya Perum Bulog dalam menyerap gabah petani sesuai ketentuan pemerintah, yakni dengan harga pembelian sebesar Rp6.500 per kilogram.

la menilai kebijakan tersebut sebagai bentuk keberpihakan negara terhadap petani, sekaligus instrumen stabilisasi harga gabah dan beras.

“Proses penyerapan gabah oleh Bulog telah berjalan sesuai keputusan pemerintah. Meski sempat ditemui beberapa kendala teknis pada tahap awal, kami optimis ke depan prosesnya akan semakin lancar,” jelasnya.

Melalui kunjungan ini, Komisi IV DPR RI ingin memastikan bahwa seluruh kebijakan dan program pemerintah di sektor pangan berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya petani sebagai produsen

“Proses penyerapan gabah oleh Bulog telah berjalan sesuai keputusan pemerintah. Meski sempat ditemui beberapa kendala teknis pada tahap awal, kami optimis ke depan prosesnya akan semakin lancar,”

Dr. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI



Tanggal Lahir :
17 Juli 1963



Dapil
Jawa Tengah IX



Keluarga

Istri : Zubaedah, SE
Anak: 7 Cucu: 3



Pendidikan

- SMA Negeri 1 Slawi, Tegal, Jawa Tengah (1979-1982)
- S1 Pendidikan Teknik Elektro, FPTK, IKIP Negeri Semarang (1987)
- S2 Manajemen, Universitas Muhammadiyah Surakarta (2002)
- S3, Ilmu Lingkungan, Universitas Diponegoro (2017)



Pekerjaan

- Guru Madrasah Aliyah NU Al Imam Adiwerna, Tegal (1986-1987)
- Kepala STM Muhammadiyah Tegal, Jawa Tengah (1987-1993)
- Sekretaris DPRD Kabupaten Tegal (1999-2004)
- Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah (2004-2009)
- Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah (2009-2014)
- Anggota DPR RI (2014-2017), (2019-2024), (2024-2029)
- Wakil Ketua Komisi X DPR RI (2017-2024)



Riwayat Organisasi

- Wakil Ketua Pengurus Daerah (PD) Pelajar Islam Indonesia (PIL) Tegal
- Ketua Ikatan Remaja Masjid Al Huda Semarang
- Pembina Yayasan Pertiwi Tegal
- Ketua Majelis Amanah Mathlaul Anwar Jateng
- Wakil Ketua Pengurus Wilayah (PW) PIL Jateng
- Ketua DPD PK Kabupaten Tegal (1998-1999)
- Ketua Daerah Dakwah Lima DPW PKS Jateng (2000-2004)
- Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) PKS Jateng (2004-2009)
- Sekretaris Wilda Jatijaya DPP PKS
- Ketua Kaukus Lingkungan Hidup DPRD Provinsi Jateng (2009-2014)
- Ketua DPW PKS Jateng (2010-2015) (2018-2020)
- Ketua BPW Jatijaya DPP PKS (2020-2025)



Dr.

Abdul Fikri Faqih

MM

Publikasi Buku

- Menuju Green Budgeting (2018)
- Benang Kusut Penyelenggaraan Pendidikan Dasar dan Menengah Di Indonesia (2019)
- Kebangkitan Ekraf Dari Regulasi (2022)
- Darurat Literasi Indonesia :
- Urgensi Reformulasi Sinergi dan Kolaborasi (2023)



Penghargaan

- Guru Teladan III Kota Tegal
- Dinas Pendidikan Kota 1983
- REDD+ academy Programme for Parliamentarians Held, Yogyakarta (2014)
- Best Legislator Award (2014)
- Anugerah Alumni Berprestasi UNNES (2017)



Sosial Media

- X : Fikrifaqih
- Instagram / Tiktok : Afikrifaqih
- Facebook : Fikri Faqih
- Youtube : Abdul Fikri Faqih



Salurkan Bantuan Pertanian, Saadiah Dorong Respons Cepat Pemda Majukan Petani Seram Bagian Timur

Seram Bagian Timur (19/04) --- Anggota DPR RI Dapil Maluku dari Fraksi PKS, Saadiah Uluputty, kembali menunjukkan komitmennya dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat kepulauan, khususnya di sektor pertanian.

Dalam kunjungan kerja yang berlangsung di Kantor Bupati Seram Bagian Timur, ia menyampaikan sekaligus menyalurkan bantuan program aspirasi berupa dukungan sarana produksi dan bibit untuk petani di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT).

Dalam acara yang dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur, Sekretaris Daerah, jajaran Organisasi Perangkat Daerah, serta Anggota DPRD SBT dan puluhan petani dari berbagai kelompok, Saadiah menyerahkan bantuan aspirasi berupa Program

Pengembangan Perbenihan Hortikultura (P2B Horti) untuk 50 kelompok tani, bibit kakao, cengkeh, dan kelapa. Bantuan ini diharapkan mampu menjadi stimulus nyata dalam mendorong produktivitas pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani di wilayah tersebut.

Sebagai Anggota Komisi IV DPR RI yang membidangi sektor pertanian, kelautan Perikanan, dan Kehutanan, Saadiah Uluputty menegaskan bahwa perjuangan untuk Maluku tidak berhenti pada legislasi dan penganggaran di pusat, melainkan

juga menyentuh langsung kebutuhan riil masyarakat di lapangan.

Politisi PKS yang juga merupakan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, yang selama ini turut mengawal agar program pemerintah pusat dapat menjangkau daerah tertinggal, termasuk di wilayah kepulauan seperti Maluku.

"Saya hadir membawa aspirasi yang konkret. Kita ingin petani di SBT naik kelas, bukan hanya secara produksi, tapi juga dari sisi nilai tambah dan kemandirian," ujar Saadiah dalam sambutannya.

Saadiah juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam mempercepat proses administrasi dan pelaksanaan program.

Saadiah mengapresiasi Bupati, Wakil Bupati, Sekda, dan Dinas Pertanian yang langsung menginstruksikan seluruh OPD agar bertindak cepat dan tidak menunda-nunda proses yang berkaitan dengan pengusulan program dan pencairan bantuan yang berasal dari pusat.

Dengan semangat kolaborasi dan keberpihakan pada rakyat kecil, Saadiah Uluputty terus mendorong agar pembangunan sektor pertanian di Maluku menjadi prioritas utama dalam agenda pembangunan daerah.

"Saya sangat mengapresiasi respon pimpinan daerah yang



"Saya hadir membawa aspirasi yang konkret. Kita ingin petani di SBT naik kelas, bukan hanya secara produksi, tapi juga dari sisi nilai tambah dan kemandirian,

SAADIAH ULUPUTTY, S.T
Anggota Komisi IV DPR RI

langsung mengkonsolidasi secara langsung dan spontan, dimana bapak Bupati menginstruksikan langsung Kadis dan Staffnya bahwa harus cepat menanggapi program-program yang akan di berikan dari pemerintah pusat.

Ketika kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah saling sinergi dan harmonis, saya yakin akan semakin mempercepat pembangunan untuk kepentingan rakyat," tutup Saadiah Uluputty.



image istimewa

Evaluasi Pelaksanaan Arus Mudik 2025, Aleg PKS Reni Astuti : Pelaksanaan Mudik 2025 Jauh Lebih Baik dari 2024

Jakarta (17/04) --- Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS Reni Astuti menanggapi pelaksanaan arus mudik dan balik lebaran tahun 2025 yang jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.

Hal tersebut disampaikan Reni saat menjadi narasumber dalam diskusi yang diadakan Koordinatariat Wartawan Parlemen (KWP) bekerja sama dengan Biro Pemberitaan DPR RI dengan tema 'Evaluasi Kebijakan Mudik 2025: Efektivitas, Tantangan, dan Rekomendasi untuk 2026', Kamis, (17/04), di Ruang PPIP Gedung Nusantara Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

"Jadi bicara tentang momen lebaran, tentu disitu ada mudik 2025, dan ini menjadi program tanggung jawab dari pemerintah untuk memberikan layanan yang terbaik terhadap masyarakat sebagai pengguna jasa," ujar Reni.

Kalau bicara tentang mudik, lanjut Reni, ada tiga hal yang menjadi tolak ukur, tentu yang pertama adalah keselamatan.

"Ini juga yang senantiasa disampaikan oleh pemerintah melalui kementerian yang bermitra dengan Komisi 5, apakah itu kemudian Kementerian Perhubungan, kemudian PU, dan juga ada Basarnas, ada BMKG, yang menyampaikan ketiga. rapat-rapat kerja di Komisi V adalah bicara tentang

hal yang utama," terang Reni.

Kedua, lanjutnya, yaitu keselamatan. Keselamatan kemudian setelah itu adalah kenyamanan dan kemudian adalah bahagia. Ujungnya seperti itu.

"Bertemu dengan keluarga itu adalah ujung dari mudik yang dilakukan oleh masyarakat setiap tahunnya. Nah, bicara tentang keselamatan, kemudian kenyamanan, itu adalah bicara tentang, pertama, kalau yang menjadi Komisi V adalah terkait dengan kelayakan jalan. Jadi kelayakan jalan di sini, tentu kita semua sudah tahu bahwa ada jalan tol, ada jalan non-tol. Nah, di sana kita melihat pada sisi kemandapan jalan ya, terkait dengan target zero jalan berlubang yang senantiasa kita dorong di Komisi V kemudian juga terkait dengan standar pelayanan minimal jalan tol," jelasnya.

Seraca umum sebenarnya, imbuh Reni, bahwa mudik di 2025, ini lebih baik dari 2024, itu mesti diapresiasi.

"Ini tentunya tidak terlepas dari peran DPR melakukan

Evaluasi Pelaksanaan Arus Mudik 2025, Aleg PKS Reni Astuti : Pelaksanaan Mudik 2025 Jauh Lebih Baik dari 2024

« SEBELUMNYA

pendampingan pengawalan ya, agar kemudian itu bisa lebih baik apa ukuran dari lebih baik itu pertama adalah terkait dengan mungkin angka kecelakaan. Angka kecelakaan ini kemudian Apakah itu fatalitas Atau kecelakaan berat Atau kecelakaan ringan Ini saya belum mendapatkan datanya secara detail," ujar Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI ini.

Kemudian, Reni menambahkan, apa yang kemudian Membuat dikatakan lebih baik diantaranya adalah titik Kepadatan yang sampai berjam-jam terjadi antrian Baik itu di jalan Tol maupun juga di Pelabuhan relatif lebih baik.

"Walaupun bisa dikatakan masih belum ideal Belum idealnya bagaimana? Contoh misalkan di jalan tol Jalan tol itu ada namanya standar pelayanan minimal Standar pelayanan minimal ini. Bahwa kecepatan di jalan tol itu kisaran antara 60 km per jam sampai 80 km per jam Artinya adalah kalau kita di jalan tol Tidak boleh sebenarnya di bawah 60 km Atau di atas 80

km Tetapi ketika momen lebaran, Kecepatan itu di bawah 60 km Karena apa? Karena adanya kepadatan Artinya adalah pengguna layanan jalan tol Dengan dia membayar, dengan dia membayar Dia tidak mendapatkan layanan sesuai dengan standar pelayanan minimal," papar Reni.

Yang nanti akan menjadi catatan, lanjut Reni, karena diskon jalan tol tidak diperlakukan di seluruh ruas Tapi diperlakukan hanya di 17 ruas jalan tol Dan itu lebih dalam rangka, untuk mengurai kepadatan bukan untuk mengurangi beban pengguna jalan tol.

"Ini saya kira menjadi catatan bahwa semestinya tarif jalan tol itu mestinya berkurang karena standar pelayanan minimal yang diberikan oleh pemerintah tidak sesuai dengan hal yang diatur di dalam peraturan menteri. Nah ini saya kira menjadi catatan terkait dengan tarif jalan tol," pungkasnya.

Hanya saja, kata Reni, yang masih menjadi catatan dan bukan hanya ketika momen lebaran atau tidak masih kita mendengar adanya calo.

"Nah ini saya kira menjadi

PR buat Kementerian Perhubungan terkait adanya calo. Bagaimana kita berharap di fasilitas pelayanan publik, itu bagaimana yang ada di kereta api sama di bandara yang sudah zero calo. Nah tetapi kalau di terminal bus kemudian di pelabuhan ini masih ada informasi yang saya dapatkan dari masyarakat. Saya kira ini menjadi catatan," ungkap Anggota DPR RI dari Dapil Jawa Timur I ini.

Terakhir terkait dengan tarif diskon pesawat karena Pemerintah telah memberikan subsidi sekitar kurang lebih 286 miliar yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan dari penguurangan PPN 6% dan terhadap untuk mengurangi beban masyarakat yang menggunakan jalan tol.

"Tapi saya melihat ini menjadi catatan bahwa pengguna transportasi udara atau pesawat ini relatif tidak mengalami kenaikan. Maka ini akan menjadi pertanyaan kenapa dengan diberlakukannya tarif diskon untuk pesawat tetapi tidak menambah kenaikan pengguna pesawat. Apakah kemudian masyarakat tidak tahu terkait dengan tarif itu bisa jadi atau juga bisa jadi kurangnya transparansi," tutup Reni.



"Ini tentunya tidak terlepas dari peran DPR melakukan pendampingan pengawalan ya, agar kemudian itu bisa lebih baik apa ukuran dari lebih baik itu pertama adalah terkait dengan mungkin angka kecelakaan. Angka kecelakaan ini kemudian Apakah itu fatalitas Atau kecelakaan berat Atau kecelakaan ringan Ini saya belum mendapatkan datanya secara detail,"

RENI ASTUTI, S.Si., M.PSDM.

Anggota Komisi V DPR RI



image istimewa

Ghufran DPR RI Dukung Penguatan Peran Strategis BPKS untuk Pembangunan Kawasan Sabang dan Aceh

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) menerima kunjungan kerja dari Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ghufran Zainal Abidin, pada Senin, 14 April 2025.

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) menerima kunjungan kerja dari Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ghufran Zainal Abidin, pada Senin, 14 April 2025.

Kunjungan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan sekaligus bentuk dukungan legislatif terhadap penguatan peran BPKS dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Sabang dan pembangunan Aceh secara menyeluruh.

Kehadiran Ghufran disambut langsung oleh Kepala BPKS Iskandar Zulkarnaen, didampingi oleh jajaran pimpinan lainnya, termasuk Wakil Kepala Abdul Manan, Deputi Umum Fajran Zain, Deputi Pengawasan Ridha Amri, Deputi Teknik dan Pengembangan Azwar Husein, serta Deputi Komersial dan Investasi Jeliteng Pribadi.

Dalam pertemuan tersebut, Kepala BPKS menyampaikan sejumlah capaian, rencana kerja jangka panjang, serta berbagai tantangan yang tengah dihadapi, termasuk keterbatasan anggaran dan

dukungan kebijakan.

Hal ini menjadi kendala dalam menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.

Menanggapi hal tersebut, Ghufran menyatakan bahwa Komisi VI DPR RI konsisten memberikan dukungan terhadap program pengembangan BPKS.

Ia menilai keberadaan lembaga ini sangat strategis, tidak hanya untuk kemajuan Sabang, tetapi juga sebagai bagian penting dalam upaya pembangunan Aceh.

Kami sejak awal mendukung langkah-langkah strategis BPKS. Ini adalah bagian dari komitmen kami terhadap pembangunan Aceh secara keseluruhan, bukan hanya wilayah Sabang," ujar Ghufran.

Ia juga menekankan pentingnya dukungan anggaran dari Pemerintah Pusat agar program kerja BPKS dapat terlaksana secara optimal.

"Kami mengharapkan

Ghufran DPR RI Dukung Penguatan Peran Strategis BPKS untuk Pembangunan Kawasan Sabang dan Aceh

« SEBELUMNYA

pemerintah pusat dapat memberikan perhatian lebih besar terhadap BPKS, khususnya dari sisi anggaran. Komisi VI akan terus mendorong agar kepentingan Aceh melalui BPKS dapat terakomodasi dengan baik," tambahnya.

Ghufran turut menyampaikan kesiapannya bersama Komisi VI untuk melakukan kunjungan lanjutan ke lapangan guna melihat langsung potensi

serta kebutuhan pengembangan kawasan.

a juga mengajak seluruh pihak agar bersinergi dalam mendukung pembangunan Sabang demi kemaslahatan masyarakat yang lebih luas.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPRK Sabang, Albina Arrahman, menegaskan komitmen penuh pihaknya terhadap setiap rencana dan program yang dijalankan oleh BPKS.

"Atas nama DPRK Sabang,

kami menyampaikan dukungan penuh terhadap seluruh program yang tengah dirancang maupun dijalankan oleh BPKS," ujar Albina.

la menambahkan bahwa aset dan potensi yang dimiliki BPKS perlu dioptimalkan sebagai landasan mempercepat pembangunan kawasan.

"Kami melihat adanya harapan baru di bawah kepemimpinan BPKS saat ini. DPRK Sabang siap bekerja sama dalam bentuk dukungan moral, program, dan sinergi lainnya untuk mewujudkan rencana-rencana tersebut," imbuhnya.

Albina juga berharap terjalinnya hubungan yang harmonis antara BPKS dan masyarakat Sabang dalam mendukung kemajuan bersama bagi daerah tersebut.



"Kami melihat adanya harapan baru di bawah kepemimpinan BPKS saat ini. DPRK Sabang siap bekerja sama dalam bentuk dukungan moral, program, dan sinergi lainnya untuk mewujudkan rencana-rencana tersebut,"

GHUFRAN

Anggota Komisi VI DPR RI



image istimewa

Dukung Kebijakan Presiden Prabowo, Politisi PKS Amin Ak Desak Pemerintah Hapus Kartel Impor Pangan

Jakarta (11/04) --- Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Amin Ak, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang ingin menghilangkan praktek kartel dengan menghapus kuota impor.

Amin menegaskan pentingnya langkah tegas untuk menghapus praktik kartel, terutama dalam impor pangan yang selama ini merugikan petani dan konsumen.

Adanya kartel impor, membuat harga pangan jauh lebih mahal. Hal itu karena kuota impor selama ini menciptakan struktur pasar oligopoli, di mana segelintir pelaku impor mengontrol harga yang merugikan konsumen.

"Sudah saatnya negara ini lepas dari jeratan kartel impor pangan. Selama ini kita terlalu bergantung pada segelintir importir besar yang mengatur harga dan distribusi bahan pangan pokok. Ini jelas merugikan rakyat," tegas Amin dalam keterangannya, Kamis (11/04) di Jakarta.

Amin mendukung rencana penghapusan sistem kuota impor yang dinilai menjadi akar dari terbentuknya kartel pangan. Menurutnya, sistem kuota selama ini menciptakan ruang sempit bagi para pemain baru, sehingga hanya segelintir

pihak yang bisa menikmati keuntungan dari impor pangan.

"Kuota impor itu ibarat pintu masuk eksklusif bagi mafia pangan. Ketika hanya beberapa pihak yang diberi izin, maka kekuatan pasar dikuasai segelintir orang. Kalau kuotanya dihapus dan diganti dengan mekanisme pasar yang transparan dan berbasis kebutuhan riil, kita bisa memberantas kartel itu dari akarnya," jelas Amin.

Lebih lanjut, Amin menegaskan bahwa keberadaan kartel pangan tidak hanya menyebabkan distorsi pasar. Tetapi juga mematickan semangat dan usaha para petani lokal.

Ia menyebut, data menunjukkan bahwa banyak komoditas strategis seperti beras, gula, daging, dan bawang putih masih diimpor dalam jumlah besar meskipun produksi dalam negeri bisa ditingkatkan.

Karena itu Wakil Ketua Fraksi PKS itu mengingatkan pentingnya untuk tetap melindungi keberlanjutan usaha

Dukung Kebijakan Presiden Prabowo, Politisi PKS Amin Ak Desak Pemerintah Hapus Kartel Impor Pangan

« SEBELUMNYA

petani dan kelompok UMKM.

“Sesuai dengan keinginan Presiden Prabowo yang ingin berdikari dalam bidang pangan, maka ini momentum yang tepat untuk membongkar dan menindak tegas mafia impor. Pemerintah harus hadir untuk

melindungi petani dan menjamin stabilitas harga di tingkat konsumen,” ujarnya.

Amin juga mendorong lembaga-lembaga terkait, seperti KPPU, BPK, dan aparat penegak hukum, untuk bersinergi dalam mengusut tuntas praktik curang dalam tata niaga pangan.

“Transparansi dan akunta-

bilitas harus menjadi prinsip utama dalam kebijakan pangan kita,” tambahnya.

Sebagai anggota Komisi VI DPR RI yang bermitra dengan Kementerian Perdagangan, Amin berkomitmen untuk terus mengawal regulasi yang mendukung produksi dalam negeri serta memberantas praktik monopoli dan oligopoli dalam rantai pasok pangan.

“Kita ingin negara ini punya kedaulatan pangan sejati, bukan hanya sekadar jargon. Rakyat butuh bukti nyata bahwa harga stabil, petani sejahtera, dan pasar berjalan adil,” tutup Amin.



“Kuota impor itu ibarat pintu masuk eksklusif bagi mafia pangan. Ketika hanya beberapa pihak yang diberi izin, maka kekuatan pasar dikuasai segelintir orang. Kalau kuotanya dihapus dan diganti dengan mekanisme pasar yang transparan dan berbasis kebutuhan riil, kita bisa memberantas kartel itu dari akarnya,”

AMIN AK, M.M.

Anggota Komisi VI DPR RI



Live
Interactive
Bersama
Anggota
Legislatif PKS



BERSAMA M. ADRIAN RASHAD



Saksikan
Setiap Pekan



image istimewa

Jelang Pelaksanaan Ibadah Haji, Fikri Faqih : Penyatuan Jemaah Haji Berdasarkan Kota/ Kabupaten

Jakarta (17/04) — Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS Abdul Fikri Faqih menyampaikan persiapan komisi VIII menghadapi musim haji 2025.

Hal tersebut disampaikan dalam Program PKS Legislatif Report Paripurna di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis, (17/04).

"Kebetulan karena

"Nanti kan badan penyelenggara haji, itu pendaftaran atau penataan yang mau berangkat, itu ternyata tidak sesuai dengan kloter yang ada di Kabupaten Kota. Nah ini banyak pembimbing yang menyampaikan aspirasi untuk kemudian mereka disatukan tetap sesuai dengan daftar atau kelompok terbang yang dari Kabupaten Kota, bukan yang disusun berdasarkan masuk di Kementerian Agama

Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH, MM

Anggota Komisi VIII DPR RI

mendekati musim haji ya, komisi delapan, saya banyak dikeluhkan bahwa salah haji memang. Jadi Banyak sekali ya, tapi saya kira yang paling menonjol itu komisi delapan karena mendekati musim haji, jadi seputar haji," ujar Fikri.

Jadi, imbuh Fikri, ada kebijakan dari Kementerian Agama yang sekarang masih menyelenggarakan.

"Nanti kan badan penyelenggara haji, itu pendaftaran atau penataan yang mau berangkat, itu ternyata tidak sesuai dengan kloter yang ada di Kabupaten Kota. Nah ini banyak pembimbing yang menyampaikan aspirasi untuk

kemudian mereka disatukan tetap sesuai dengan daftar atau kelompok terbang yang dari Kabupaten Kota, bukan yang disusun berdasarkan masuk di Kementerian Agama," ungkap Anggota DPR RI dari Dapil Jawa Tengah I ini.

Mudah-mudahan, kata Fikri, nanti bisa mereka dikumpulkan dan nanti bisa bersama-sama menuliskan ibadah haji.

"Sesuai dengan tugas pokok fungsinya yang pembimbing, ya pembimbing kelompoknya, bukan terpisah-pisah. Terpisah bagaimana supaya dicantumkan. Itu rata-rata itu," tutup Fikri.




JEJAK PERJUANGAN PKS MENGAWAL KESEJAHTERAAN OJOL HINGGA REALISASI BANTUAN HARI RAYA (BHR)

1

PKS TV DPR RI | FPKS DPR RI | @fraksipdprri | @fraksipdprri | @fraksipdprri

sumber: Berita Fraksi PKS | Grafika Hari



21 Februari 2025

Dorongan Regulasi THR untuk Ojol

Rolitali PKS Kurniasih mendorong regulasi kesejahteraan pengemudi ojol, termasuk pemberian THR.



27 Maret 2025

Peringatan untuk Aplikator: Jangan Eksploitatif

Anggota DPR Reni Astuti mengkritik sistem kerja aplikator yang dinilai tidak adil & membebani pengemudi.



2

PKS TV DPR RI | FPKS DPR RI | @fraksipdprri | @fraksipdprri | @fraksipdprri

sumber: beritafraksiPKS | Grafika Hari



10 Maret 2025

Presiden Prabowo Imbau Beri BHR

Presiden Prabowo menyerukan pemberian Bonus Hari Raya (BHR) bagi pengemudi ojol.



11 Maret 2025

DPR Terima Aspirasi Serikat Ojol

Reni Astuti perjuangkan legalitas dan perlindungan sosial pengemudi ojol.



3

PKS TV DPR RI | FPKS DPR RI | @fraksipdprri | @fraksipdprri | @fraksipdprri

sumber: Berita Fraksi PKS | Grafika Hari



11 Maret 2025

Surat Edaran Menaker Resmi Terbit

SE Menaker No. M/2/HK.04.00/III/2025 dikeakan Menteri Yassierli: BHR wajib untuk pengemudi & kurir layanan aplikasi.



14 Maret 2025

Dukungan FPKS: Ojol Adalah Pahlawan Digital

Wakil Ketua FPKS Netty: THR bentuk apresiasi untuk para pengemudi & kurir digital.



4

PKS TV DPR RI | FPKS DPR RI | @fraksipdprri | @fraksipdprri | @fraksipdprri

sumber: Berita Fraksi PKS | Grafika Hari



1. kesejahteraan ojol berkembang dari dorongan regulasi.
2. kritik terhadap eksploitasi oleh aplikator
3. Perjuangan Legalitas
4. Dukungan pemberian THR sebagai apresiasi

PKS Berkomitmen terus mengawal dan memperjuangkan hak-hak pekerja, mitra driver ojek online, agar mendapatkan keadilan dan perlindungan yang layak



PKS TV DPR RI | FPKS DPR RI | @fraksipdprri | @fraksipdprri | @fraksipdprri

sumber: Berita Fraksi PKS | Grafika Hari






image istimewa

Aleg PKS Kurniasih: Tegakkan Hukum dan Dorong Pemberangkatan Resmi Pekerja Migran guna Cegah TPPO

Jakarta (20/04) --- Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati menegaskan pentingnya memperkuat dua pendekatan utama dalam mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO), yaitu penegakan hukum yang konsisten dan pemberangkatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri melalui jalur resmi yang telah ditentukan oleh negara.

Menurut Kurniasih, permasalahan TPPO memang bukan isu baru. Namun demikian, berbagai pihak termasuk aparat penegak hukum dinilai telah melakukan upaya maksimal untuk menekan angka kasus TPPO yang masih terjadi hingga hari ini.

"Kita melihat penegakan hukum sudah berjalan, aparat yang memiliki kewenangan sudah melakukan tugasnya secara maksimal. Mungkin perlu peningkatan hukum yang harus berjalan di dua negara. Tetapi, di saat yang sama, kita juga harus memperkuat aspek kesadaran masyarakat agar tidak tergoda jalan pintas yang berisiko tinggi," ujar Kurniasih.

Kurniasih menekankan bahwa jalur pemberangkatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri harus mengikuti ketentuan resmi yang tersedia, baik melalui skema antar pemerintah (Government to Government/G to G) maupun swasta ke

swasta (Business to Business/B to B).

"Kalau semua proses keberangkatan pekerja dilakukan sesuai dengan regulasi resmi, maka semuanya akan lebih aman, terlindungi, dan terpantau oleh negara. Sayangnya, banyak korban TPPO yang berangkat melalui jalur tidak resmi karena tergiur iming-iming calo atau karena kurangnya akses informasi," lanjutnya.

Ia juga mengakui bahwa masih ada tantangan di tingkat akar rumput, terutama terkait keterbatasan lapangan kerja di daerah dan kurangnya informasi komprehensif terkait pemberangkatan PMI melalui jalur prosedural. Hal ini mendorong sebagian masyarakat memilih jalur informal yang pada akhirnya sangat berisiko.

"Kami terus mendorong pemerintah untuk memperluas sosialisasi dan edukasi kepada

Aleg PKS Kurniasih: Tegakkan Hukum dan Dorong Pemberangkatan Resmi Pekerja Migran guna Cegah TPPO

« SEBELUMNYA

masyarakat, Kementerian Ketenagakerjaan juga sudah memulai dengan job fair yang rutin digelar, serta penyebaran informasi peluang kerja ke pelosok-pelosok daerah yang selama ini belum tersentuh," ucap Kurniasih.

Kurniasih juga mendorong adanya peningkatan kapasitas tenaga kerja melalui program skilling, reskilling, dan upskilling agar calon pekerja dapat me-

enuhi kebutuhan pasar kerja, baik di dalam maupun luar negeri. Ia menyebut pentingnya link and match antara pelatihan dan kebutuhan kerja agar tidak selalu bergantung pada pasar luar negeri.

"Pemerintah kini juga telah membangun sistem yang lebih sederhana, murah, dan terintegrasi untuk proses penempatan tenaga kerja ke luar negeri. Artinya, tidak ada lagi alasan untuk memilih jalur tidak resmi," tambahnya.

Kurniasih turut mengapresiasi KBRI dan KJRI yang tetap berkomitmen tinggi dalam perlindungan WNI dan PMI di luar negeri. Namun, menurutnya, pencegahan TPPO tidak cukup dilakukan sepihak, melainkan membutuhkan kerja sama dua negara, baik dari sisi keberangkatan maupun penerimaan.

"Penegakan hukum harus dilakukan secara bilateral. Negara asal dan negara tujuan sama-sama harus menunjukkan komitmennya dalam memberantas praktik perdagangan manusia. Edukasi dan kampanye pencegahan TPPO juga harus dilakukan secara berkelanjutan dan masif," tutup Kurniasih.



Image istimewa



“Kalau semua proses keberangkatan pekerja dilakukan sesuai dengan regulasi resmi, maka semuanya akan lebih aman, terlindungi, dan terpantau oleh negara. Sayangnya, banyak korban TPPO yang berangkat melalui jalur tidak resmi karena tergiur iming-iming calo atau karena kurangnya akses informasi,”

**Dr. Hj. KURNIASIH
MUFIDAYATI, M.Si.**

Anggota Komisi IX DPR RI



image istimewa

Pelecehan oleh Dokter di Bandung, Komisi IX FPKS Alifudin: Kita Harus Perkuat Pengawasan Tugas Profesi Dokter

Pontianak (10/04) --- Isu pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang dokter Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) terhadap keluarga pasien di Bandung semakin memanaskan perdebatan mengenai etika dan standar operasional prosedur (SOP) dalam praktik kedokteran di Indonesia.

Kasus ini mengungkap kelemahan pengawasan terhadap perilaku medis yang dilakukan oleh tenaga kesehatan serta perlunya penegakan hukum dan aturan yang lebih tegas di sektor ini.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Dapil Kalimantan Barat 1, Alifudin menyatakan keprihatinannya atas peristiwa tersebut serta meminta penguatan dalam pelaksanaan prosedur para dokter serta penanganan kasus perundungan yang masih marak di dunia pendidikan kedokteran.

Menurut Alifudin, tindakan yang dilakukan oleh dokter PPDS tersebut jelas merupakan pelanggaran serius terhadap etika profesi medis yang mengutamakan keselamatan dan kenyamanan pasien.

"Tindak pelecehan semacam ini menunjukkan adanya kegagalan dalam pengawasan terhadap perilaku tenaga medis, yang seharusnya mengutamakan martabat pasien dan

keluarganya. Ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga menghancurkan kepercayaan publik terhadap dunia kedokteran," ujar Alifudin.

Alifudin menekankan pentingnya penguatan pelaksanaan SOP yang ketat bagi dokter dalam melakukan tindakan medis terhadap pasien dan etika dengan keluarga pasien.

"SOP yang jelas dan terukur sangat penting agar setiap tindakan medis yang dilakukan selalu sesuai dengan kaidah medis yang berlaku. Hal ini tidak hanya berlaku pada tindakan medis kepada pasien, tetapi juga dalam interaksi dengan keluarga pasien," tegasnya.

SOP yang kuat akan mengurangi risiko penyalahgunaan kekuasaan yang dapat terjadi, sekaligus memberikan perlindungan bagi pasien dan keluarga dari potensi pelecehan.

Selain itu, Alifudin juga menyoroti kasus perundungan

Pelecehan oleh Dokter di Bandung, Komisi IX FPKS Alifudin: Kita Harus Perkuat Pengawasan Tugas Profesi Dokter

« SEBELUMNYA

dokter junior oleh seniorinya beberapa waktu lalu. Alifudin meminta agar pihak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) segera mengambil langkah tegas terkait perundungan yang terjadi terhadap dokter junior di lingkungan rumah sakit.

"Fenomena perundungan atau bullying yang dialami oleh dokter junior dari para seniorinya juga perlu segera dituntaskan. Sebab, selain berbahaya bagi psikologis para tenaga medis muda, hal ini juga

menciptakan budaya kerja yang tidak sehat, yang berujung pada kinerja yang buruk dan bahkan dapat memengaruhi keselamatan pasien," ungkap Alifudin.

Alifudin juga menekankan perlunya pengawasan dan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap segala bentuk pelanggaran dalam dunia kedokteran.

"Kami mendesak pihak kepolisian dan lembaga terkait untuk segera memproses kasus ini hingga tuntas baik aksi pelecehan ataupun perundungan, serta memastikan agar tidak ada lagi

tindakan serupa yang terjadi di masa depan. Kepercayaan publik terhadap profesi medis hanya bisa dipulihkan jika ada kepastian hukum yang jelas dan tegas," tegasnya.

Alifudin mengusulkan pembentukan sistem pelaporan yang lebih efektif dan aman bagi pasien, keluarganya, dan tenaga medis yang melanggar aturan, atau seperti tenaga medis yang terancam atau menjadi korban perundungan.

"Kami berharap agar Kemenkes dapat membentuk sistem pelaporan yang independen, di mana dokter dan tenaga medis lainnya dapat melaporkan setiap pelanggaran atau tindakan yang tidak sesuai dengan etika medis tanpa rasa takut. Hal ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan profesional bagi semua pihak," tutup Alifudin.



image istimewa



"Tindak pelecehan semacam ini menunjukkan adanya kegagalan dalam pengawasan terhadap perilaku tenaga medis, yang seharusnya mengutamakan martabat pasien dan keluarganya. Ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga menghancurkan kepercayaan publik terhadap dunia kedokteran,

H. ALIFUDIN, S.E., M.M

Anggota Komisi IX DPR RI



Legislator PKS Alifudin Minta Kemenkes dan IDI Investigasi dan Lindungi Korban Pelecehan Seksual Oknum Dokter

Jakarta (17/04) — Menanggapi maraknya laporan pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum dokter terhadap pasien maupun keluarga pasien,

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Alifudin mendesak Kementerian Kesehatan (Kemendes) dan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) untuk segera melakukan investigasi menyeluruh.

Alifudin menegaskan pentingnya penguasaan kasus-kasus ini hingga tuntas demi menjaga integritas profesi dokter di Indonesia.

"Kita tidak boleh membiarkan kasus-kasus ini terus berulang. Kemenkes dan PB IDI harus turun tangan langsung, membentuk tim khusus untuk menyelidiki setiap laporan yang muncul, baik yang sudah viral maupun yang belum terungkap. Ini bukan hanya soal pelanggaran hukum, tapi juga pelanggaran berat terhadap etika profesi kedokteran," tegas Alifudin usai Rapat Paripurna

DPR RI di Senayan.

Lebih lanjut, Alifudin juga meminta Kemenkes dan PB IDI untuk berkoordinasi dengan aparat kepolisian guna memastikan proses hukum berjalan dengan adil dan tegas terhadap para pelaku.

Ia menekankan bahwa langkah hukum harus dilakukan secara serius agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku dan mencegah kejadian serupa di masa mendatang.

"Kita tidak bisa hanya menunggu sampai kasus-kasus ini viral. Harus ada upaya sistematis untuk mendeteksi dan menindak setiap pelanggaran. Negara harus hadir memberi perlindungan maksimal kepada para korban. Proses hukum harus ditegakkan secara serius, adil, dan transparan," ujar legislator dari Dapil Kalimantan

Barat 1 itu.

Dalam pernyataannya, Alifudin juga menyoroti pentingnya memberikan rasa aman bagi korban untuk melapor tanpa takut akan intimidasi atau stigma.

Ia mendesak semua pihak, termasuk institusi kesehatan, untuk menciptakan lingkungan yang suportif dan ramah korban. Alifudin meminta institusi terkait menjaga keamanan dan memberi pendampingan kepada para korban.

"Para korban harus dilindungi. Negara dan institusi kesehatan wajib memberikan pendampingan psikologis maupun hukum agar korban merasa aman dan tidak sendiri. Pun terhadap korban yang belum melapor, segeralah berikan laporan kasus, saya minta Kemenkes, IDI, dan Polri menjamin keamanan dan beri pendampingan kepada para korban," tegas Alifudin.

Alifudin juga mengingatkan kepada para tenaga kesehatan, khususnya dokter, untuk senantiasa menjunjung tinggi



"Kita tidak boleh membiarkan kasus-kasus ini terus berulang. Kemenkes dan PB IDI harus turun tangan langsung, membentuk tim khusus untuk menyelidiki setiap laporan yang muncul, baik yang sudah viral maupun yang belum terungkap."

H. ALIFUDIN, S.E., M.M

Anggota Komisi IX DPR RI

etika profesi dalam menjalankan tugasnya, agar masyarakat dapat percaya kepada integritas tenaga kesehatan.

"Etika profesi adalah pondasi dari kepercayaan masyarakat terhadap dunia medis. Dokter ataupun nakes lain adalah

pejaga kesehatan dan kehidupan, bukan pelanggar kehormatan. Mari jaga martabat profesi ini bersama-sama, jagalah marwah etika profesi ini sebagaimana yang sudah diucap ketika pengambilan sumpah profesi," tutup Alifudin.



image istimewa

Aleg PKS Desak Kemenkes dan Polisi Usut Tuntas Dugaan Pelecehan oleh Dokter Kandungan di Garut

Jakarta (16/04) — Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Netty Prasetyani mengemukakan keras tindakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh seorang dokter kandungan kepada pasien perempuan saat pemeriksaan USG di sebuah fasilitas kesehatan di Garut, Jawa Barat.

Ia meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) serta aparat kepolisian segera turun tangan mengusut kasus ini hingga tuntas.

“Jika benar terjadi, tindakan ini tidak hanya melanggar kode etik profesi kedokteran, tapi sudah termasuk bentuk kekerasan seksual yang sangat tidak manusiawi,” tegas Netty

“Pihak kepolisian harus segera memanggil terduga pelaku, memeriksa CCTV, dan menggali keterangan dari korban maupun saksi. Jangan biarkan pelaku kekerasan seksual di dunia medis bebas berkeliaran dan mengancam pasien lain,”

Dr. Hj. NETTY PRASETYANI, M.Si

Anggota Komisi IX DPR RI

dalam keterangan persnya, Rabu, 16 April 2025.

Netty menilai, peristiwa ini bisa mencoreng wajah dunia kesehatan Indonesia dan menggoyahkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan, khususnya layanan yang diberikan kepada perempuan.

Netty meminta Kemenkes agar segera membentuk tim investigasi independen yang melibatkan unsur etik dan profesi medis untuk menyelidiki dugaan tersebut.

“Kemenkes harus bergerak cepat. Audit menyeluruh perlu dilakukan terhadap praktik dokter yang bersangkutan, termasuk memeriksa sistem pengawasan dan standar operasional di tempatnya bekerja,” ujarnya.

Selain itu, Netty juga

meminta aparat kepolisian agar bersikap proaktif dalam menindaklanjuti informasi yang beredar luas di masyarakat.

“Pihak kepolisian harus segera memanggil terduga pelaku, memeriksa CCTV, dan menggali keterangan dari korban maupun saksi. Jangan biarkan pelaku kekerasan seksual di dunia medis bebas berkeliaran dan mengancam pasien lain,” tambahnya.

Menurut Netty kasus ini harus menjadi momentum perbaikan sistem pengawasan dalam dunia kesehatan agar pelayanan medis menjadi ruang yang aman dan bermartabat, terutama bagi perempuan.

“Hentikan kekerasan seksual dalam dunia kesehatan. Tegakkan hukum dan keadilan,” pungkasnya.



image istimewa

Soal Penjurusan di SMA, Aleg PKS Ledia Hanifa: Perlu Pendampingan yang Tepat

Jakarta (15/04) — Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Ledia Hanifa Amaliah menanggapi soal isu penjurusan yang kembali dilakukan di SMA.

Menurut Ledia penjurusan di SMA merupakan langkah yang logis dan wajar dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

Namun, Ledia menambah-

kan, penjurusan harus dilakukan dengan pendampingan yang tepat, mulai dari sekolah dasar hingga SMA, untuk membantu siswa menemukan minat dan bakat mereka.

"Penjurusan di SMA perlu dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan siswa dan kebutuhan pembangunan negara, terutama dalam bidang teknologi dan sains," imbuh Sekretaris Fraksi PKS DPR RI ini. Ledia melanjutkan Indonesia ini memerlukan guru-guru yang berdedikasi dan memiliki pendidikan yang baik untuk membimbing siswa sejak dini.

Ledia juga menekankan pentingnya guru bimbingan konseling di sekolah dasar dan menengah untuk membantu siswa membangun kepercayaan diri, kemampuan belajar, dan memilih karir yang tepat.

"Dengan demikian, siswa dapat memilih jurusan yang sesuai dengan minat dan bakat mereka, bukan hanya karena gengsi atau kesannya lebih

keren," ujarnya.

Dalam konteks pembangunan negara, Ledia menyoroti pentingnya meningkatkan kualitas pendidikan di bidang teknologi dan sains untuk mencapai kemandirian dan kedaulatan pangan.

"Kita perlu mempersiapkan engineer-engineer yang menguasai teknologi pertanian dan pengembangan produksi pangan untuk mendukung pembangunan negara," tegasnya.

Ledia berharap bahwa penjurusan di SMA dapat dilakukan dengan mempertimbangkan semua aspek yang diperlukan, termasuk guru yang berdedikasi, sarana-prasarana yang memadai, dan pendampingan yang tepat sejak dini.

"Dengan demikian, siswa dapat memilih jurusan yang sesuai dengan minat dan bakat mereka dan menjadi sumber daya manusia yang berkualitas untuk pembangunan negara," tutup Ledia.

"Kita perlu mempersiapkan engineer-engineer yang menguasai teknologi pertanian dan pengembangan produksi pangan untuk mendukung pembangunan negara."

**Hj. LEDIA HANIFA A.,
S.Si., M.Psi.T**

Anggota Komisi X DPR RI

KEBIJAKAN SISTEM PENERIMAAN SISWA BARU (SPMB) BEGINI DETAILNYA!

1

[PKS TV DPR RI](#) | [FKPS DPR RI](#) | [@rakspkdpdri](#) | [@pkspdri](#) | [@fraksipkdpr](#)
 sumber: kemendikdasmen | Grafika Harti

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) akan mengganti sistem **Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)** jadi sistem **Penerimaan Murid Baru (SPMB)** mulai 2025

Salah satu Perubahan besar adalah jalur penerimaan murid yang sebelumnya berdasarkan **Zonasi**, kini beralih ke **Domisili**.

ini dia bedanya.

2

[PKS TV DPR RI](#) | [FKPS DPR RI](#) | [@rakspkdpdri](#) | [@pkspdri](#) | [@fraksipkdpr](#)
 sumber: kemendikdasmen | Grafika Harti

ZONASI

Berdasarkan jarak antara tempat tinggal siswa dengan sekolah

Menggunakan dokumen pendudukan, seperti Kartu Keluarga (KK)

Menggunakan jarak satuan pendidikan dengan alamat yang tertera di KK

DOMISILI

Berdasarkan wilayah administratif yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah

Mempertimbangkan Jarak antara sekolah dengan rumah alias domisili

Tidak lagi menggunakan dokumen pendudukan sebagai tolak ukur utama

3

[PKS TV DPR RI](#) | [FKPS DPR RI](#) | [@rakspkdpdri](#) | [@pkspdri](#) | [@fraksipkdpr](#)
 sumber: kemendikdasmen | Grafika Harti

PERUBAHAN KUOTA JALUR SPMB
(PRESENTASE KUOTA SETIAP JENJANG HARUS MEMENUHI 100%)

JALUR	PPDB	SPMB
Domisili	Min. 70%	Tetap
Afirmasi	Min. 10%	Tetap
Prestasi	Tidak Ada	Tetap
Mutasi	Maks. 5%	Tetap

JALUR	PPDB	SPMB
Domisili	Min. 50%	Min. 40%
Afirmasi	Min. 10%	Min. 20%
Prestasi	Sisa Kuota	Min. 25%
Mutasi	Maks. 5%	Tetap

JALUR	PPDB	SPMB
Domisili	Min. 50%	Min. 30%
Afirmasi	Min. 10%	Min. 30%
Prestasi	Sisa Kuota	Min. 30%
Mutasi	Maks. 5%	Tetap

4

[PKS TV DPR RI](#) | [FKPS DPR RI](#) | [@rakspkdpdri](#) | [@pkspdri](#) | [@fraksipkdpr](#)
 sumber: kemendikdasmen | Grafika Harti

KETENTUAN SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB)

Sekolah negeri hanya boleh melakukan penerimaan murid baru sesuai dengan kuota yang ditetapkan. Penguncian Dapodik akan dilakukan 1 (satu) bulan sebelum pengumuman SPMB.

Murid yang tidak tertampung di sekolah negeri difasilitasi oleh Pemda untuk belajar di sekolah swasta yang terakreditasi sesuai kemampuan keuangan daerah sesuai dengan *Permendagri Nomor 3 Tahun 2023* *Bab IV tentang Pengelolaan Dana BOSP Satuan Satuan Pendidikan Swasta.*

5

[PKS TV DPR RI](#) | [FKPS DPR RI](#) | [@rakspkdpdri](#) | [@pkspdri](#) | [@fraksipkdpr](#)
 sumber: kemendikdasmen | Grafika Harti

"Perlu juga menjadi perhatian Kementerian terkait agar dalam pelaksanaannya nanti benar-benar memperhatikan kemudahan akses bagi seluruh anak bangsa"

Hj. Ledia Hanifa A., S.Si., M.Psi.T
Anggota Komisi X DPR RI

6

[PKS TV DPR RI](#) | [FKPS DPR RI](#) | [@rakspkdpdri](#) | [@pkspdri](#) | [@fraksipkdpr](#)
 sumber: Berita FKPS DPR RI | Grafika Harti



Komisi XI FPKS Anis Byarwati: Penerimaan Negara Belum Optimal, Perlu Usaha yang Masif

Jakarta (22/04) — Realisasi pendapatan negara hingga 31 Maret 2025 tercatat sebesar sebesar Rp 516,1 triliun, sementara belanja negara Rp 620,3 triliun.

Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS Anis Byarwati mengingatkan Kementerian Keuangan untuk terus mendorong peningkatan pendapatan negara di tengah dinamika geopolitik global.

"Penerimaan perpajakan hingga akhir Maret mencapai 16,1 persen dari target APBN, jauh lebih rendah dibandingkan tahun 2024 yang melampaui 20 persen, atau 2023 sebesar 24,96 persen, tentu tidak bisa terlepas dari pengaruh ekonomi global, tarif dan efektivitas Cor-tax" katanya, di Jakarta (22/4).

Anggota DPR Komisi XI ini memberikan saran kepada pemangku kebijakan agar segera perbaiki Core tax dan melakukan penetrasi pasar lebih besar kepada Amerika Serikat.

"Terdapat potensi yang cukup besar untuk meraup tambahan \$6,4 Miliar dengan asumsi 10% pangsa pasar _peers_." Penetrasi pasar ini

bermanfaat besar bagi ekonomi Indonesia, karena memiliki multiplier effect besar dari penciptaan lapangan kerja untuk sektor padat karya," ungkap Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan ini.

Legislator Perempuan PKS ini menyebut bahwa turunnya juga harga komoditas sangat berdampak terhadap penerimaan negara (Pajak dan PNB).

"Kita sudah mengingatkan Pemerintah untuk meminimalisir dampak anjloknya harga komoditas. Terbukti penurunan harga komoditas sangat sensitif terhadap penerimaan negara," paparnya.

Akan tetapi Anis juga mengapresiasi penerimaan pajak per Maret 2025 (yoy) mulai tumbuh positif.

"Kinerjanya sudah baik harus dipertahankan, seperti penerimaan kumulatif Desember 2024 sampai dengan Maret

2025 menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya," ujarnya.

"Pelaksanaan realisasi anggaran harus berjalan sesuai jadwal, Ini seringkali jadi hal tersulit untuk dilakukan, beragam instansi pemerintah mengalami keterlambatan penyerapan anggaran, padahal ketidakpastian global kian nyata sehingga memerlukan usaha yang masif dari setiap lini pemerintah," kata Anis.

Anggota Fraksi PKS ini mendorong agar APBN segera didistribusikan kepada sektor yang memiliki _multiplier effect_ yang tinggi, sehingga memacu sektor usaha kecil hingga besar mendapat manfaat dari aliran uang yang meningkat.

"Apalagi menurut data Survei Bank Indonesia (BI) mencatat terjadi penurunan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) dalam 3 bulan beruntun sejak Januari 2025, sehingga ini harus menjadi konsen dari para pemangku kebijakan," ungkapnya.



"Pelaksanaan realisasi anggaran harus berjalan sesuai jadwal, Ini seringkali jadi hal tersulit untuk dilakukan, beragam instansi pemerintah mengalami keterlambatan penyerapan anggaran, padahal ketidakpastian global kian nyata sehingga memerlukan usaha yang masif dari setiap lini pemerintah,"

**Dr. Hj. ANIS BYARWATI,
S.Ag.,M.Si**

Anggota Komisi XI DPR RI



image istimewa

Aleg PKS Kholid Soroti Situasi Ekonomi Global dan Dorong Kebijakan Pemerintah Terukur serta Pro-Nasional

Jakarta (17/04) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Muhammad Kholid menyoroti perkembangan situasi ekonomi global yang tengah berlangsung, dan menegaskan pentingnya bagi pemerintah Indonesia

untuk merumuskan kebijakan ekonomi secara terukur dengan tetap mengedepankan kepentingan nasional.

Hal tersebut disampaikan dalam Program PKS Legislatif Report (PLR) di masa

“Tidak semua sektor harus dibuka untuk impor. Kita harus selektif, terutama dalam memilih sektor-sektor yang justru bisa mendukung dan mendorong kinerja industri ekspor nasional. Jadi impor boleh, tapi harus yang mendukung penguatan industri ekspor kita

**H. MUHAMMAD
KHOLID, S.E., M.Si.**

Anggota Komisi XI DPR RI

pembukaan sidang paripurna di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Kamis (17/04/2024).

“Kita menginginkan agar setiap kebijakan yang diambil pemerintah dalam menghadapi dinamika ekonomi global benar-benar mempertimbangkan kepentingan nasional. Ini penting agar stabilitas ekonomi domestik tetap terjaga,” ujar Kholid.

Salah satu sektor yang menjadi perhatian Kholid adalah kebijakan impor. Ia menegaskan bahwa regulasi impor harus dijalankan secara selektif agar tidak melemahkan industri dalam negeri.

“Tidak semua sektor harus dibuka untuk impor. Kita harus selektif, terutama dalam memilih sektor-sektor yang justru bisa mendukung dan mendorong kinerja industri ekspor nasional. Jadi impor boleh, tapi harus yang mendukung penguatan

industri ekspor kita,” jelasnya.

Lebih lanjut, Kholid juga menekankan pentingnya peningkatan penerimaan perpajakan secara signifikan. Menurutnya, peningkatan pendapatan negara dari sektor perpajakan sangat dibutuhkan untuk mendukung pembangunan yang lebih ekspansif ke depan.

“Dengan tantangan pembangunan ke depan yang semakin besar, kita membutuhkan dorongan fiskal yang kuat. Oleh karena itu, penerimaan perpajakan harus terus ditingkatkan secara signifikan,” tutupnya.

Pernyataan ini menegaskan komitmen Muhammad Kholid dalam mendorong kebijakan ekonomi yang tidak hanya responsif terhadap dinamika global, tetapi juga berpihak pada penguatan ekonomi nasional dan kemandirian bangsa.



Aleg PKS Dorong PLN Tingkatkan Sosialisasi Berakhirnya Program Diskon Tarif Listrik

Jakarta (22/04) --- Anggota DPR RI Fraksi PKS, Nevi Zuairina, mendorong PT PLN (Persero) untuk terus meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait berakhirnya program diskon tarif listrik bagi pelanggan rumah tangga dengan daya 2.200 VA ke bawah.

Harapan ini disampaikan menyusul munculnya sejumlah keluhan dari masyarakat terkait lonjakan tagihan listrik setelah masa diskon berakhir.

"PLN sebagai BUMN yang sangat dekat dengan masyarakat perlu memperkuat komunikasi publiknya. Sosialisasi melalui akun resmi dan kanal informasi lainnya sangat penting agar masyarakat tidak salah paham terhadap kebijakan yang tengah dijalankan," ujar Nevi dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (20/04/2025).

Politisi PKS dari daerah pemilihan Sumatera Barat II ini menyampaikan bahwa kebijakan diskon tarif listrik merupakan bagian dari stimulus pemerintah yang berlangsung hingga 28 Februari 2025, guna mendukung masyarakat pascapandemi dan di tengah fluktuasi ekonomi global.

"Pemerintah telah menjalankan kebijakan stimulus secara maksimal. Namun tentu perlu disampaikan secara luas bahwa sejak 1 Maret 2025, tarif kembali

berlaku normal sesuai Permen ESDM No. 7 Tahun 2024 dan skema penyesuaian tarif triwulanan," jelas Nevi.

Wakil Rakyat Sumbar ini menilai bahwa PLN telah melakukan langkah yang tepat dengan membuka akses komunikasi kepada pelanggan yang membutuhkan klarifikasi atau penyesuaian terkait tagihan listrik mereka. Ia pun mengapresiasi pendekatan solutif yang dilakukan oleh PLN

terhadap masyarakat.

"Jika ada warga yang masih merasa tagihannya tidak sesuai, saya imbau untuk tidak ragu mendatangi unit layanan PLN terdekat. Silakan dicek bersama-sama agar tidak ada kesalahpahaman," tambah Nevi.

Sebagaimana diketahui, sebelumnya Vice President Komunikasi Korporat PLN, telah menyampaikan bahwa lonjakan tagihan pasca-Ramadan bisa disebabkan oleh peningkatan pemakaian maupun berakhirnya program diskon tarif yang berlangsung di bulan Januari dan Februari.

"Kita semua akan mendukung terhadap kebijakan pemerintah ketika diiringi dengan keterbukaan informasi dan edukasi publik yang menyeluruh, demi kenyamanan dan kepercayaan masyarakat," tutup Nevi Zuairina.

"Pemerintah telah menjalankan kebijakan stimulus secara maksimal. Namun tentu perlu disampaikan secara luas bahwa sejak 1 Maret 2025, tarif kembali berlaku normal sesuai Permen ESDM No. 7 Tahun 2024 dan skema penyesuaian tarif triwulanan,"

Hj. NEVI ZUAIRINA

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Sumatera Barat II



Politisi PKS Muh Haris Dukung Target Indonesia Jadi Pemimpin Dunia Energi Panas Bumi 2029

Salatiga (16/04) --- Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PKS, Muh Haris, menyatakan dukungannya terhadap target pemerintah menjadikan Indonesia sebagai negara dengan kapasitas pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) terbesar di dunia pada tahun 2029.

Hal ini ia sampaikan di sela kegiatan reses di Kota Salatiga, Jawa Tengah, Rabu (16/4).

Muh Haris menilai, langkah pemerintah untuk menyalip Amerika Serikat dalam pengembangan energi panas bumi merupakan ambisi yang realistis sekaligus strategis dalam mendorong transisi energi bersih nasional.

Ia pun mendorong agar seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat, daerah, maupun pelaku industri seperti BUMN dan swasta, dapat bersinergi dan bekerja lebih progresif.

"Potensi panas bumi kita mencapai lebih dari 23 gigawatt, namun baru sekitar 11 persen yang dimanfaatkan. Ini peluang besar untuk kita dorong bersama. Komisi XII DPR RI akan terus mendukung percepatan realisasi target ini, termasuk dari sisi regulasi dan pengawasan kebijakan," ujar Haris.

Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034,

pemerintah menargetkan tambahan kapasitas panas bumi sebesar 5,2 GW. Jika target antara 2024 hingga 2029 sebesar 1,1 GW dapat tercapai, Indonesia diperkirakan akan menyalip Amerika Serikat dan menjadi pemilik kapasitas PLTP terbesar di dunia.

Haris juga menyeroti pentingnya dukungan infrastruktur, investasi, dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam pengembangan panas bumi. Ia berharap pengembangan

sumber daya energi ini juga dapat menciptakan dampak ekonomi positif di daerah-daerah penghasil energi.

"Kita ingin energi bersih yang bukan hanya berkelanjutan, tetapi juga adil dan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat lokal," tegas politisi dari daerah pemilihan Jawa Tengah I ini.

Sebagai informasi, saat ini Indonesia berada di posisi kedua dunia dalam kapasitas terpasang PLTP setelah Amerika Serikat, dengan kapasitas sekitar 2,68 GW per akhir 2024. Pemerintah menargetkan pengembangan berkelanjutan untuk mendukung pencapaian target Net Zero Emissions (NZE) pada 2060.

Dengan dukungan legislatif dan sinergi semua pihak, Haris optimis Indonesia mampu menjadi raksasa energi hijau dunia dalam waktu dekat.

"Potensi panas bumi kita mencapai lebih dari 23 gigawatt, namun baru sekitar 11 persen yang dimanfaatkan. Ini peluang besar untuk kita dorong bersama. Komisi XII DPR RI akan terus mendukung percepatan realisasi target ini, termasuk dari sisi regulasi dan pengawasan kebijakan,

Dr. H. MUH. HARIS, S.S., M.Si.

Anggota Komisi XII DPR RI



Anggota FPKS Meitri Dukung Pengelolaan Limbah PLTU Paiton yang Perhatikan Keberlanjutan Lingkungan

Jakarta (15/04) — Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PKS, Meitri Citra Wardani menyuarakan persoalan lingkungan yang timbul akibat operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Paiton dalam kunjungan kerja resesnya ke PLTU Paiton, Jawa Timur.

Dalam kunjungan tersebut, Meitri menyuarakan secara khusus pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang dihasilkan dalam jumlah besar oleh PLTU Paiton.

Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur, sekitar 153 juta ton dari total 170 juta ton limbah B3 di Jawa Timur berasal dari PLTU Paiton.

"PLTU Paiton memainkan peran strategis sebagai pemasok sekitar 20 persen kebutuhan listrik di wilayah Jawa dan Bali. Dengan peran sebesar itu,

risiko lingkungan yang ditimbulkan pun tidak bisa diabaikan. Karena itu, kami menekankan pentingnya skema pengelolaan limbah yang menjamin keberlanjutan lingkungan dan daya dukung hidup masyarakat sekitar," jelas Meitri di sela kunjungan kerja Komisi XII DPR RI di masa reses yang berlangsung sejak tanggal 12-16 April 2025.

Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VIII tersebut juga menekankan pentingnya pengujian berkala terhadap kualitas tanah, air

tanah, dan udara di seluruh area penimbunan limbah. Meitri mendesak agar langkah mitigasi dan pemulihan segera dilakukan jika ditemukan indikasi pencemaran.

"Kami mendorong pengawasan ketat terhadap kontraktor yang terlibat dalam pengelolaan limbah, untuk memastikan kinerja yang akuntabel dan profesional. Pengawasan bisa dilakukan melalui audit berkala, dan jika ditemukan pelanggaran, sanksi tegas harus diberlakukan. Manajemen PLTU juga harus memastikan kontraktor memiliki rekam jejak yang kredibel dan sesuai standar," tegas Meitri.

Pernyataan ini disampaikan Meitri merespons berbagai isu lingkungan yang mencuat akibat operasional PLTU Paiton. Dia juga mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap pihak kontraktor, khususnya jika ditemukan indikasi pelanggaran yang berpotensi merusak lingkungan dan melanggar ketentuan hukum.

Di sisi lain, Meitri mengapresiasi langkah PLTU Paiton dalam menerapkan teknologi co-firing dengan biomassa sebagai salah satu bentuk transisi energi bersih. Ia menilai pendekatan ini dapat mengurangi emisi yang dihasilkan dari pembakaran batu bara.

Selain itu, Meitri menyinggung potensi pemanfaatan sumber daya lokal dari papirnya, seperti Mojokerto, yang dikenal



Pengawasan bisa dilakukan melalui audit berkala, dan jika ditemukan pelanggaran, sanksi tegas harus diberlakukan. Manajemen PLTU juga harus memastikan kontraktor memiliki rekam jejak yang kredibel dan sesuai standar,"

Hj. MEITRI CITRA WARDANI, S.H.

Anggota Komisi XI DPR RI

memiliki jenis tanaman yang cocok dijadikan bahan bakar biomassa, seperti Kaliandra Merah dan Akasia.

"Melalui program CSR, manajemen PLTU bisa mendorong masyarakat untuk mengembangkan Hutan Tanaman Energi (HTE) berbasis

tanaman lokal. Ini tidak hanya mendukung operasional pembangkit secara berkelanjutan, tetapi juga membuka peluang pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pelestarian lingkungan sekitar," pungkasnya.



image istimewa

Aleg PKS Meity Rahmatia Kecam Pelecehan dan Pemeriksaan Perempuan di Bandung dan Yogya

Jakarta (15/04) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Meity Rahmatia mengecam tindakan kekerasan terhadap perempuan dalam dua peristiwa baru-baru ini.

Anggota Komisi XIII ini meminta penegak hukum segera menangkap pelaku dan mengancam hukuman berat.

"Harapannya tentu agar kejadian serupa tidak berulang-

"Ingatan dan kesedihan kita tentang kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan di Nusa Tenggara Timur oleh oknum aparat belum hilang. Ada lagi yang terjadi. Cara yang mereka lakukan juga benar-benar kejam dan diluar nalar.

**Hj. MEITY RAHMATIA,
S.Pd., S.E., M.M.**

Anggota Fraksi PKS DPR RI Sulawesi Selatan I

ulang lagi terjadi dan menimpa wanita," ungkapnya kepada awak media di gedung DPR RI, Senin (14/04/2025).

Dua peristiwa itu adalah pemeriksaan yang dilakukan dokter residen PPDS Unpad di RSHS Bandung dan dugaan kekerasan seksual seorang mahasiswi oleh oknum guru besar Farmasi Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

Meity yang aktif di sejumlah organisasi sosial dan keperempuanan itu menyayangkan kekerasan seksual perempuan kembali terjadi di Indonesia. Berlangsung bahkan tidak berselang lama.

"Ingatan dan kesedihan kita tentang kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan di Nusa Tenggara Timur oleh oknum aparat belum hilang. Ada lagi yang terjadi. Cara yang mereka lakukan juga benar-benar kejam dan diluar nalar.

Mereka memanfaatkan relasi kuasa dan profesinya atau kedudukannya untuk menjalankan perilaku busuknya terhadap korban perempuan," geram Meity.

Meity mengaku berkoordinasi dengan pemerintah, Komnas HAM dan LPSK dalam rangka mendorong penegakan hukum dan perlindungan terhadap korban kekerasan.

"Kami di Komisi XIII senantiasa berkoordinasi dengan kementerian terkait hukum dan Hak Asasi Manusia. Begitu juga dengan Komnas HAM dan LPSK untuk melindungi korban dari tekanan dan intimidasi serta kekerasan ganda akibat pemberitaan media dan informasi pada platform media sosial. Identitas mereka idealnya harus dijaga agar karena para korban memiliki masa depan," pungkasnya.

PROGRAM UNGGULAN

FRAKSI PKS DPR RI



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
Kecatif Atroaktif Substantif

Parlementaria (Diskusi Publik,
PKS Legislative Corner, PKS Legislative Report,
Ruang Aleg dan Internshipsks)



Diskusi, dialog, dan kolaborasi Fraksi PKS dengan pejabat publik, pakar, ahli, tokoh CSO, dan aktivis yang kompeten serta generasi muda untuk membahas, mengkaji, dan terlibat pada isu-isu publik dari sudut pandang parlemen.



Meitri Citra Wardani Salurkan Ribuan Paket Sembako bagi Warga Mojokerto di Masa Reses

Mojokerto (09/04) -- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Meitri Citra Wardani menyalurkan sebanyak 1800 paket sembako kepada masyarakat di Desa Kenanten, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto.

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan selama masa reses yang bertepatan dengan sehari menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri 1446 H, yang ditetapkan pemerintah jatuah pada 31 Maret 2025.

Agenda pembagian sembako ini dilaksanakan bersama keluarga besar dan tim Meitri Citra Wardani di dapil Jatim VIII sebagai wujud kepedulian kepada masyarakat yang menghadapi kesulitan ekonomi terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok menjelang lebaran.

"Pembagian sembako ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu agar tetap dapat merasakan kebahagiaan menjelang Idul Fitri. Kegiatan ini sengaja dirancang bertepatan dengan sehari menjelang lebaran sebagai bentuk THR untuk masyarakat," ujar Meitri, Ahad (30/03/2025).

Anggota DPR Dapil Jawa Timur VIII ini menjelaskan bahwa tradisi THR pada mulanya memang berbentuk bantuan bahan pokok dan hanya diperuntukan bagi pegawai pemerintah, tetapi kini diubah dalam bentuk tunai.

Selain itu, kini sasaran THR tidak hanya diperuntukan bagi pegawai pemerintah, tetapi juga bagi pekerja swasta maupun bagi masyarakat dari berbagai lapisan. Meski begitu, Meitri memilih untuk kembali ke esensi awal dalam pembagian THR.

"Kami berikan dalam bentuk sembako agar tepat sasaran dalam peruntukannya dan benar-benar digunakan untuk pemenuhan kebutuhan primer rumah tangga, utamanya pemenuhan kebutuhan pangan

di hari lebaran. Kami khawatir bila dalam bentuk tunai, ada sebagian yang mungkin menyalahgunakannya, misalnya untuk membeli rokok atau paket data sehingga hal itu menyimpang dari tujuan awalnya," tambahnya.

Meitri menambahkan, ke depan, kegiatan pembagian sembako seperti ini akan dilaksanakan secara rutin setiap menjelang Idul Fitri di berbagai titik wilayah Dapil Jatim VIII, yang mana hal itu telah dimulai dari Kabupaten Mojokerto.

"Kami berkomitmen untuk konsisten hadir di tengah masyarakat, membawa manfaat dan mendorong terwujudnya kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada rakyat kecil, terutama di momen-momen penting seperti Hari Raya," tandasnya.

"Pembagian sembako ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu agar tetap dapat merasakan kebahagiaan menjelang Idul Fitri. Kegiatan ini sengaja dirancang bertepatan dengan sehari menjelang lebaran sebagai bentuk THR untuk masyarakat,"

Hj. MEITRI CITRA WARDANI, S.H.

Anggota Komisi XI DPR RI



Muh Haris Apresiasi Gagasan Gubernur Jateng Soroti Potensi Minerba dan Tantangan Pengelolaan Sampah

Semarang (10/04) -- Anggota Komisi XII DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah I dari Fraksi PKS, Muh Haris, memberikan apresiasi atas inisiatif Gubernur Jawa Tengah

yang menggelar acara Halal Bihalal Gubernur Jawa Tengah dengan Forum Senayan Peduli Jawa Tengah, Rabu (9/4) di Kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah.

Menurut Muh Haris, forum tersebut merupakan ruang strategis untuk mempererat kolaborasi antara para wakil rakyat di Senayan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menjawab berbagai tantangan dan memaksimalkan potensi daerah.

"Saya sangat mengapresiasi gagasan Pak Gubernur. Forum ini bukan sekadar ajang silaturahmi, tetapi menjadi momentum penting untuk menyatukan langkah demi kemajuan Jawa Tengah," ungkap Haris saat acara berlangsung.

Dalam forum tersebut, Muh Haris juga menyoroti pentingnya optimalisasi potensi sumber daya alam, khususnya di sektor mineral dan batu bara (minerba).

Ia menilai, perubahan terbaru dalam Undang-Undang Minerba 2025 membuka peluang lebih besar bagi daerah

dalam mengelola kekayaan alam secara adil dan berkelanjutan.

"Jawa Tengah memiliki potensi besar di sektor minerba. Dengan revisi UU Minerba yang memberikan akses kepada koperasi, UMKM, hingga ormas keagamaan, kita harus pastikan pengelolaan ini berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Namun demikian, Haris juga mengingatkan bahwa di tengah potensi tersebut, Jawa Tengah menghadapi tantangan

serius dalam pengelolaan sampah. Ia menilai, problematika sampah menjadi isu krusial yang membutuhkan penanganan terintegrasi dan inovatif.

"Sampah bukan hanya soal lingkungan, tapi juga kesehatan dan ekonomi masyarakat. Kita perlu mendorong kolaborasi lintas sektor, termasuk memanfaatkan teknologi pengolahan seperti RDF dan memperkuat peran masyarakat melalui program bank sampah dan edukasi," tegasnya.

Muh Haris menutup pernyataannya dengan mengajak seluruh elemen di Jawa Tengah untuk terus bersinergi membangun daerah melalui pendekatan yang inklusif dan berbasis keberlanjutan.

"Jawa Tengah memiliki potensi besar di sektor minerba. Dengan revisi UU Minerba yang memberikan akses kepada koperasi, UMKM, hingga ormas keagamaan, kita harus pastikan pengelolaan ini berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,"

Dr. H. MUH. HARIS, S.S., M.Si.

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Tengah I



Kunker di Dapil

Adang Daradjatun Hadiri Halal bi Halal dan Sampaikan Pendidikan Politik

Jakarta (14/04) — Anggota DPR RI Fraksi PKS, Adang Daradjatun melakukan kunjungan kerja pada masa sidang II di Daerah Pemilihan (Dapil) DKI Jakarta III

yaitu Kelurahan Srengeng, Kembangan Jakarta Barat, dan Kelurahan Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, pada (12-13/4/2025).

Kunjungan ini bertujuan untuk mempererat komunikasi sekaligus Halal bi Halal dengan masyarakat serta memberikan pendidikan politik, pemahaman mengenai berbagai isu penting terkait dengan Mitra Kerja di Komisi III, bahaya narkoba, dan keamanan lingkungan (Kamtibmas).

Dalam kesempatan ini, Adang Daradjatun menekankan pentingnya kesadaran politik masyarakat agar lebih aktif dalam menentukan arah pembangunan bangsa.

“Pendidikan politik adalah kunci untuk menciptakan masyarakat yang sadar akan

hak dan kewajibannya sebagai warga negara, seperti halnya dalam setiap PEMILU, pilihlah Caleg yang turun langsung dan peduli dengan Masyarakatnya yang sepatutnya dipilih, jangan pilih Caleg yang hanya hadir pada saat kampanye dan setelah jadi mereka lupa kepada pemilihnya,” ujar Adang dalam sambutannya.

Selanjutnya Adang juga menyampaikan terkait isu yang menjadi perhatian saat ini dengan Mitra Kerjanya yaitu terkait pembahasan RUU tentang KU-HAP yang mana menjadi target untuk dapat diselesaikan paling tidak sampai akhir tahun 2025.

Terkait hal tersebut Adang menyampaikan pentingnya revisi RUU KUHP karena akan memperbaiki sistem penegakan hukum di Indonesia, seperti me-

ngedepankan Keadilan Restoratif atau Restorative justice dan penguatan yang lebih berkeadilan terkait pendampingan saksi, korban maupun tersangka oleh Penasihat Hukum dalam menjalankan hukum acara.

Selain itu, dalam upaya melindungi generasi muda dari bahaya narkoba, acara ini juga menghadirkan Edy Inhari, SH dari Aliansi Gerakan Anti Narkotika Nasional (AGANN), yang menyampaikan materi terkait ancaman narkoba bagi generasi muda serta langkah-langkah pencegahannya.

“Narkoba adalah musuh bersama. Kita semua harus berperan aktif dalam mencegah penyebarannya di lingkungan kita,” tegas Edy.

Untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, Bimaspol dan Babinsa setempat turut hadir memberikan edukasi terkait Kamtibmas.

Mereka mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap kondisi lingkungan sekitar, meningkatkan kerja sama dengan aparat, serta aktif melaporkan kejadian yang mencurigakan guna menciptakan suasana yang lebih aman dan kondusif.

“Kami ingin terus hadir di tengah masyarakat, mendengar aspirasi langsung, serta memberikan manfaat nyata bagi warga Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Semoga kegiatan ini semakin mempererat hubungan antara masyarakat dan wakilnya di DPR RI,” tutup Adang.



“Pendidikan politik adalah kunci untuk menciptakan masyarakat yang sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, seperti halnya dalam setiap PEMILU, pilihlah Caleg yang turun langsung dan peduli dengan Masyarakatnya yang sepatutnya dipilih, jangan pilih Caleg yang hanya hadir pada saat kampanye dan setelah jadi mereka lupa kepada pemilihnya,”

Drs. H. ADANG DARADJATUN

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil DKI Jakarta II



Serah Terima Simbolis Bantuan TJSL, Nevi Zuairina Dorong Sinergi Semua Pihak untuk Kesejahteraan Rakyat

Padang (17/04) --- Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PKS, Nevi Zuairina, kembali menunjukkan komitmennya dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat di daerah pemilihannya, Sumatera Barat II.

Dalam kunjungan kerjanya kali ini, Nevi menyerahkan secara simbolis bantuan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dari PT Bukit Asam kepada sejumlah pihak yang membutuhkan di Kabupaten Agam dan Pasaman Barat.

Bantuan pertama diserahkan kepada pengurus Masjid At-Taqwa yang berada di Jorong Mantuang, Nagari Batabuah, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam.

Dalam sambutannya, Nevi menyampaikan bahwa keberadaan rumah ibadah harus selalu mendapatkan perhatian karena menjadi pusat kegiatan spiritual dan sosial masyarakat.

"Kita ingin memperkuat peran masjid tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga pusat pengembangan masyarakat dan dakwah," ujar politisi PKS ini.

Selanjutnya, penyerahan bantuan TJSL dilaksanakan di Kabupaten Pasaman Barat. Salah satu yang menerima manfaat adalah Kelompok Tani Baiyo di Nagari Kajai Selatan, Kecamatan Talamau. Bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas petani

sekaligus memperkuat ketahanan pangan di wilayah tersebut.

Nevi menyampaikan bahwa sektor pertanian masih menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat pedesaan, dan oleh karena itu harus terus didorong melalui kolaborasi antara negara, BUMN, dan masyarakat.

Dalam kesempatan berikutnya, bantuan TJSL juga diberikan kepada Yayasan Rumah Belajar (Rumbel) Buk Lina yang berada di Simpang Empat, Pasaman Barat. Yayasan ini bergerak dalam bidang pendidikan non formal, terutama bagi anak-anak kurang mampu.

Nevi menyatakan bahwa dukungan kepada sektor pendidikan, apalagi yang berbasis

masyarakat dan kerelawanan, sangat penting untuk menjamin akses belajar yang merata dan berkualitas.

Wakil Rakyat Sumbar ini menegaskan bahwa penyaluran bantuan ini merupakan bentuk sinergi antara dirinya sebagai wakil rakyat di Komisi XII DPR RI, yang membidangi BUMN, dengan PT Bukit Asam sebagai salah satu perusahaan negara yang berkomitmen terhadap pembangunan sosial masyarakat.

la berharap program TJSL semacam ini dapat terus dilanjutkan dan diperluas cakupannya, menasar lebih banyak lagi kelompok rentan dan daerah yang membutuhkan.

"Insyah Allah, ke depan kami akan terus memperjuangkan agar program-program yang langsung menyentuh kebutuhan rakyat seperti ini terus hadir dan memberi dampak nyata bagi masyarakat," tutup Nevi Zuairina.

sektor pertanian masih menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat pedesaan, dan oleh karena itu harus terus didorong melalui kolaborasi antara negara, BUMN, dan masyarakat.

HJ. NEVI ZUAIRINA
Anggota Komisi XII DPR RI



image istimewa

Fikri Faqih Turun Langsung ke Lokasi Bencana Tanah Bergerak Brebes, Pastikan Bantuan Tiba dan Kawal Rencana Relokasi

Brebes (23/04) — Skala dampak bencana tanah bergerak di Desa Mendala, Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, begitu memprihatinkan hingga menarik perhatian langsung dari Senayan.

Anggota Komisi VIII DPR RI, Abdul Fikri Faqih, didampingi Direktur Infrastruktur Darurat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI Yufferyzal dan Plt Kepala Pelaksana BPBD Brebes Supriyadi, turun langsung meninjau lokasi

terdampak pada Senin (21/04/2025).

Kunjungan legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini dilakukan di berbagai titik. Diantaranya menyisir titik-titik pergerakan tanah, mendatangi posko pengungsian di lapangan futsal Desa Mendala, serta meninjau langsung kondisi dapur umum dan posko kesehatan yang didirikan untuk melayani para penyintas.

Dari hasil peninjauan dan dialog di lokasi, Fikri mengaku sangat prihatin melihat musibah yang menimpa ratusan warga di empat pedukuhan Desa Mendala. Saat kunjungannya, data yang dihimpun menunjukkan 123 KK terdampak, 114 rumah rusak, dan 383 jiwa terpaksa mengungsi.

"Kondisinya tentu dinamis karena tanah masih bergerak," ujar Fikri, menyampaikan data tersebut pada Rabu (23/4/2025) di Jakarta.

Sebagai wujud kepedulian nyata, Fikri bersama rombongan juga menyerahkan bantuan darurat dari BNPB untuk meringankan beban berat para korban.

"Kita menyerahkan bantuan 200 paket sembako, 50 hygiene kits, dan 200 matras," jelasnya.

Fikri menegaskan distribusi bantuan vital ini diatur langsung oleh Kepala Desa dan Kepala Posko, memastikan kebutuhan konsumsi harian pengungsi tetap terpenuhi

hingga saat ini.

Dalam kesempatan berinteraksi langsung di posko pengungsian, Fikri mendengarkan aspirasi dan keluhan warga serta petugas di lapangan, mulai dari tim kesehatan hingga relawan dapur umum. Ia mencatat beberapa kebutuhan mendesak yang perlu segera diatasi.

"Secara umum tak banyak kendala berarti. Hanya dapur umum masih agak telat [pasokan] tabung gas, yang rata-rata [butuh] 6 per hari, masih kurang 1 atau 2 tabung. Mudah-mudahan Ibu Bupati segera mengusahakannya," papar Fikri.

Selain itu, tim kesehatan meminta tenda khusus untuk mengisolasi pengungsi yang sakit serius demi mencegah penularan. Menanggapi permintaan ini, Plt Kalaksa BPBD Brebes, Supriyadi, memastikan tenda yang dibutuhkan akan segera dikirim karena ketersediaannya.

Fokus penanganan bencana ini, menurut Fikri, harus mencakup langkah cepat dan akurat untuk jangka panjang.

Dia mendorong dilakukannya kajian mendalam dari Badan Geologi dan Dinas ESDM Provinsi guna menentukan secara pasti penyebab pergerakan tanah dan sebaran area rawan. Kajian ini krusial sebagai dasar pengambilan kebijakan strategis, termasuk keputusan final mengenai

Fikri Faqih Turun Langsung ke Lokasi Bencana Tanah Bergerak Brebes, Pastikan Bantuan Tiba dan Kawal Rencana Relokasi

« SEBELUMNYA

relokasi warga.

Mengenai solusi hunian bagi para korban, Fikri menyebut komunikasi intensif antar pihak terkait sudah mulai terjalin, menyadari pentingnya sinergi kuat antara pemerintah desa, kabupaten, provinsi, hingga pusat. Pemerintah desa telah menyiapkan lahan alternatif untuk pembangunan hunian sementara (huntara).

"Ke depan kita akan kawal tindak lanjut Huntara di tanah

bengkok desa dan kemudian Huntap yang perlu kajian Badan Geologi Nasional yang lebih komprehensif," ujarnya.

Dia menginformasikan, tim survei lokasi relokasi bahkan dijadwalkan turun pada Rabu (23/4/2025), dua hari setelah kunjungannya.

Proses pembangunan hunian tetap (huntap), diakui Fikri, akan lebih kompleks, terutama terkait pendataan ulang dan status kepemilikan lahan warga yang terdampak.

"Proses ini memang cukup

rumit, terutama bagi lahan bengkok (tanah kas desa). Namun, lahan milik masyarakat pribadi akan lebih mudah diproses dengan bantuan dan fasilitasi dari pemerintah provinsi," jelas legislator dari daerah pemilihan (dapil) IX Jawa Tengah (Brebes, Kota Tegal dan Kabupaten Tegal) ini.

Meski prosesnya tidak mudah, Fikri optimis dan menargetkan agar dalam kurun waktu satu tahun ke depan, warga terdampak sudah dapat menempati hunian tetap yang aman dan layak. Ia mengaku terkesan dengan sikap ketabahan para korban bencana.

"Rumahnya mereka sebelumnya dalam kondisi sangat baik, namun kini rusak parah bahkan hancur akibat bencana. Meski dihadapkan pada kenyataan pahit ini, warga tetap menunjukkan sikap ikhlas yang luar biasa. Sikap mereka justru menjadi motivasi kuat bagi kami untuk terus berupaya maksimal memberikan bantuan dan solusi terbaik," tutur Fikri.

Di akhir kunjungannya, Fikri berpesan agar para korban tetap menjaga kebersamaan, saling mendukung, dan mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam menghadapi situasi sulit ini.

"Saya sudah menyampaikan kebersamaan antara korban, saling guyub, serta pentingnya dekat dengan Allah SWT dan saling mendoakan," pungkasnya.



"Ke depan kita akan kawal tindak lanjut Huntara di tanah bengkok desa dan kemudian Huntap yang perlu kajian Badan Geologi Nasional yang lebih komprehensif,"

**Dr. H. ABDUL
FIKRI FAQIH, MM**

Anggota Ketua Komisi VIII DPR RI



image Istimewa

Warga Kabupaten Bogor Diajak Dewan RI Achmad Ru'yat untuk Mendukung Diplomasi Presiden RI ke Timur Tengah

Kabupaten Bogor (21/04) -- Anggota DPR RI daerah pemilihan (dapil) Kabupaten Bogor Achmad Ru'yat mengajak masyarakat Kabupaten Bogor

untuk mendukung diplomasi Presiden RI Prabowo Subianto yang melakukan lawatan kerja ke timur tengah.

Ru'yat mengatakan bahwa Presiden Prabowo telah melakukan diplomasi internasional, datang ke Abu Dhabi Emirat berjumpa dengan Muhammad bin Zayed, kemudian ke Turki menemui Presiden Erdogan, hingga datang ke Mesir menemui Presiden Mesir, General Asisi.

"Selain itu Presiden Prabowo juga datang ke Jordania menemui Raja Abdullah II, kita dukung diplomasi Presiden Republik Indonesia untuk terjadinya kemerdekaan di Palestina, sebuah kawasan yang dulu sebelum kita merdeka menyatakan dukungan yang pertama

atas kemerdekaan kita 17 Agustus 1945," kata Ru'yat usai ditemui dalam acara Aksi Peduli Palestina - Kabupaten Bogor di depan lapangan Tegar Beriman, Kecamatan Cibinong, Ahad (20/04/2025).

Selain itu, anggota Badan legislasi ini juga mengaku pernah datang langsung ke Palestina hingga menyanyikan lagu Kumsulahun di depan tentara zionis Israel.

"Saya ajak berjabat tangan, mereka diam saja, betapa sombongnya tentara laknat Israel, mari dengan kita berjuang mendoakan di forum yang sangat bahagia mudah-mudahan didengar, Free Palestine!," tandas Ru'yat.

"Saya ajak berjabat tangan, mereka diam saja, betapa sombongnya tentara laknat Israel, mari dengan kita berjuang mendoakan di forum yang sangat bahagia mudah-mudahan didengar, Free Palestine!,"

drh. H. ACHMAD RU'YAT, M.Si.

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat V

FRAKSI PKS DORONG PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA: LANGKAH MENUJU KEADILAN DAN KESEJAHTERAAN

1

PKS TV DPR RI | PKS DPR RI | fraksipksdprri | @fraksipksdprri | fraksipksdprri

sumber: Berita Fraksi PKS | Grafika Hari

Pekerja migran Indonesia berkontribusi besar terhadap **devisa negara**, namun sering menghadapi tantangan seperti **pendagangan orang, kekerasan, dan pelanggaran HAM**.

Jumlah pekerja migran Indonesia saat ini **5,2 juta orang**; **4,3 juta merupakan PMI ilegal**

Kontribusi remitansi PMI terhadap perekonomian Indonesia **251,1 Triliun sepanjang 2024**

RUU Perubahan Ketiga UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia hadir untuk memperkuat perlindungan mereka.

2

PKS TV DPR RI | PKS DPR RI | fraksipksdprri | @fraksipksdprri | fraksipksdprri

sumber: BeritaFraksiPKS | Grafika Hari

NEGERA TUJUAN UTAMA PEKERJA MIGRAN INDONESIA 2024

- SEANG 12.720 Pekerja
- TAIWAN 84.581 Pekerja
- HONGKONG 99.773 Pekerja
- MALAYSIA 51.723 Pekerja
- SINGAPORE 10.819 Pekerja

SEKTOR PEKERJAAN

100.096	52.029	22.527	20.665
AGRIKULTUR DAN PERIKANAN	PERUMAHAN	PEKERJA LAINNYA	BERSEKUTUANG

3

PKS TV DPR RI | PKS DPR RI | fraksipksdprri | @fraksipksdprri | fraksipksdprri

sumber: BPKRI | Grafika Hari

APA YANG DIPERJUANGKAN DALAM RUU INI?

- Perlindungan Hukum**
Penambahan Pasal 21 untuk melindungi, memiadi, dan bantuan hukum bagi pekerja migran.
- Hak Ibadah**
Jaminan pemenuhan hak ibadah dalam perjanjian kerja (Pasal 15 huruf a).
- Pelatihan dan Pembinaan**
Peningkatan kualitas pelatihan bahasa, budaya, dan hukum negara tujuan (Pasal 34).
- Perluasan Ruang Lingkup**
Perlindungan untuk awak kapal, pekerja musiman, dan pekerja lintas batas.
- Hotline Pengaduan**
Layanan pengaduan 24/7 untuk pekerja migran di dalam dan luar negeri.
- Biaya Penempatan**
Biaya penempatan tidak boleh dibebankan kepada pekerja migran.
- Pengampunan**
Perlindungan bagi pekerja migran yang tidak berdokumen atau korban perdagangan orang (Pasal 86A).

4

PKS TV DPR RI | PKS DPR RI | fraksipksdprri | @fraksipksdprri | fraksipksdprri

sumber: Berita Fraksi PKS | Grafika Hari

FRAKSI PKS MENDUKUNG RUU INI DENGAN CATATAN

- Partisipasi publik dalam pembahasan RUU.
- Kesiapan infrastruktur teknologi untuk sistem informasi pekerja migran.
- Pengawasan ketat terhadap perusahaan penempatan pekerja migran.

5

PKS TV DPR RI | PKS DPR RI | fraksipksdprri | @fraksipksdprri | fraksipksdprri

sumber: Berita Fraksi PKS | Grafika Hari

”

“Perlindungan pekerja migran di Indonesia dalam UU Nomor 18 Tahun 2017 masih belum mampu mengatasi permasalahan, perkembangan, dan kebutuhan hukum dalam perlindungan pekerja migran Indonesia. Bersama kita wujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi pekerja migran Indonesia di seluruh dunia”

dr. Gamal Alibinsaid
Anggota Komisi X DPR RI

6

PKS TV DPR RI | PKS DPR RI | fraksipksdprri | @fraksipksdprri | fraksipksdprri

sumber: Berita PKS DPR RI | Grafika Hari



image istimewa

Terima Kunjungan Apdesi Tanah Luas, Nasir Djamil Dorong Perlindungan Hukum dan Revisi UUPA Soal Masa Jabatan Kades

Jakarta (21/4) – Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dapil Aceh II, H. M. Nasir Djamil, menerima kunjungan aspirasi dari perwakilan APDESI Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara, di Ruang Rapat Pleno Fraksi PKS, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (21/4/2025).

Pertemuan tersebut menjadi ruang diskusi strategis, khususnya membahas aspirasi terkait perlindungan hukum bagi para geuchik (kepala desa) serta dorongan agar Pemerintah Aceh segera merevisi Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) agar selaras dengan ketentuan baru dalam Undang-Undang Desa yang menetapkan masa jabatan kepala desa selama 8 tahun.

Nasir Djamil menyampaikan apresiasinya atas kehadiran para geuchik dari Tanah Luas dan menegaskan komitmennya sebagai wakil rakyat Aceh untuk menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan.

“Saya memberikan apresiasi kepada Pak Al Halim dan seluruh rombongan geuchik. Aspirasi mengenai masa jabatan 8 tahun memang sudah diatur dalam Undang-Undang Desa, tapi di Aceh kita punya UUPA sebagai lex specialis. Maka perlu ada revisi agar Aceh juga bisa mengikuti

ketentuan itu secara sah dan konstitusional,” ujar Nasir.

Lebih lanjut, Nasir mendorong agar Apdesi menyusun saran tertulis yang rasional dan terukur untuk disampaikan kepada Pemerintah Aceh dan DPR.

“Jangan hanya pakai kata ‘pokoknya’. Harus dijelaskan alasannya, konsiderannya, kenapa Aceh juga ingin menyesuaikan dengan UU Desa. Karena revisi UUPA butuh dasar yang kuat, baik dari sisi hukum maupun situasi sosial masyarakat desa di Aceh,” tegasnya.

Ia juga menanggapi permintaan terkait perlindungan hukum bagi para geuchik yang masih minim pemahaman terhadap aturan pengelolaan dana desa. Dalam hal ini, Nasir mengangkat pentingnya revitalisasi program “Jaksa Jaga Desa” serta mendorong penyediaan paralegal di setiap desa.

Nasir menjelaskan bahwa paralegal yang dimaksud

Terima Kunjungan Apdesi Tanah Luas, Nasir Djamil Dorong Perlindungan Hukum dan Revisi UUPA Soal Masa Jabatan Kades

« SEBELUMNYA

adalah warga berpendidikan hukum, seperti mahasiswa atau sarjana hukum yang dilatih untuk memahami proses dan aspek hukum pemerintahan gampong.

“Paralegal ini bisa jadi juru bicara kampung, bantu buat

berita, hadapi wartawan, bahkan jembatan antara geuchik dan aparat penegak hukum. Kalau Tanah Luas punya 57 kampung, kita butuh 57 paralegal. Ini bentuk perlindungan hukum yang nyata bagi para geuchik,” jelasnya.

Pertemuan dilanjutkan dengan diskusi hangat guna

mencari solusi konkret terhadap berbagai tantangan yang dihadapi pemerintahan gampong, termasuk isu-isu pembangunan di sekitar wilayah proyek strategis nasional yang dinilai belum berpihak kepada masyarakat lokal.

Sebagai penutup, Nasir Djamil menyatakan akan membawa hasil pertemuan ini ke dalam forum-forum formal DPR RI dan mendorong kolaborasi aktif antara pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat posisi dan kapasitas pemerintahan gampong di Aceh.



image istimewa



“Paralegal ini bisa jadi juru bicara kampung, bantu buat berita, hadapi wartawan, bahkan jembatan antara geuchik dan aparat penegak hukum. Kalau Tanah Luas punya 57 kampung, kita butuh 57 paralegal. Ini bentuk perlindungan hukum yang nyata bagi para geuchik,

Dr. H.M. NASIR DJAMIL, M.Si

Anggota Komisi III DPR RI



Terima Aspirasi Masyarakat Peduli Anak, Askweni Dorong Regulasi Nasional Cegah Kecanduan Game Online

Jakarta (17/04) -- Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Askweni, menerima kunjungan aspirasi dari Forum Masyarakat Peduli Anak (FMPA) di Ruang Bidang Inbang Fraksi PKS, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/4).

Dalam pertemuan tersebut, FMPA menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap semakin maraknya kecanduan game online di kalangan anak dan remaja.

Perwakilan FMPA menyampaikan bahwa fenomena kecanduan game online bukan lagi persoalan sepele.

Mereka mengungkapkan bahwa di berbagai daerah telah ditemukan kasus anak yang mengalami gangguan psikologis, hingga kasus ekstrem seperti percobaan bunuh diri akibat ketergantungan pada permainan daring.

"Anak-anak sekarang bahkan ada yang belum bisa bicara tapi sudah dikenalkan dengan game. Ini harus segera kita tanggapi serius sebelum menjadi bencana sosial," ujar Askweni dalam tanggapannya.

Ia menilai bahwa fenomena ini bukan sekadar masalah rumah tangga, melainkan ancaman nyata terhadap kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan. Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret dan

kolaboratif antar-lembaga.

"Kalau anak-anak kita hari ini tidak punya budaya literasi, tidak punya ilmu pengetahuan karena waktunya habis hanya untuk bermain game, maka jangan heran kalau nanti kita tidak punya SDM unggul. Akhirnya yang jadi manajer dan pemimpin di negeri ini bisa-bisa justru dari bangsa lain," tegasnya.

Menurut Askweni, penting bagi negara untuk hadir melalui regulasi yang tegas. Ia mendorong adanya inisiatif DPR RI untuk merancang regulasi atau bahkan undang-undang pembatasan akses game online, terutama

pada jam-jam yang seharusnya diisi oleh kegiatan keluarga, belajar, dan ibadah.

"Kalau perlu ada peraturan dari maghrib sampai isya bebas gadget. Itu waktu keluarga, waktu belajar, waktu ibadah. Harus ada pembatasan yang jelas. Jangan sampai negara kita hanya menjadi pasar tanpa mendapatkan apa-apa dari industri ini," kata Askweni.

Ia juga menyebutkan bahwa dirinya siap menjadi corong aspirasi FMPA dalam sidang-sidang parlemen ke depan, terutama terkait isu perlindungan anak dari pengaruh buruk digital.

"Anak adalah aset bangsa. Mereka bukan korban dari kemajuan teknologi. Kita sebagai wakil rakyat harus menjadi pelindung, bukan hanya pengamat," pungkasnya.

FMPA berharap agar pertemuan ini menjadi langkah awal kolaborasi strategis antara masyarakat sipil dan legislatif untuk menyelamatkan generasi muda dari ancaman kecanduan digital

"Kalau perlu ada peraturan dari maghrib sampai isya bebas gadget. Itu waktu keluarga, waktu belajar, waktu ibadah. Harus ada pembatasan yang jelas. Jangan sampai negara kita hanya menjadi pasar tanpa mendapatkan apa-apa dari industri ini,

H. ASKWENI, S.Pd.
Anggota Komisi VIII DPR RI



Terima Aspirasi Asklin

Komisi IX FPKS Dorong Pemerataan Layanan Kesehatan dan Keadilan bagi Klinik Swasta

Jakarta (22/04) — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Komisi IX DPR RI menerima kunjungan dari Asosiasi Klinik Indonesia (Asklin) bersama DPD PKS Kabupaten Pandeglang

untuk menyampaikan aspirasi terkait pelayanan BPJS Kesehatan, khususnya pemerataan distribusi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan tantangan yang dihadapi klinik swasta dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

Kunjungan ini diterima Anggota Komisi IX Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati selaku Kapoksi, bersama Anggota Komisi IX lainnya yakni Netty Prasetyani, Achmad Ru'yat, dan Alifudin.

Dalam dialog yang berlangsung terbuka dan penuh keakraban ini, para anggota dewan menyatakan dukungan kuat terhadap upaya memperju-

angkan pemerataan layanan kesehatan.

“Data dan fakta yang disampaikan Asklin sangat penting bagi kami. Ini menjadi penguat dalam rapat-rapat kami bersama mitra, agar kebijakan yang dihasilkan lebih adil dan berpihak pada klinik swasta yang selama ini turut membantu pemerintah memberikan pelayanan kesehatan,” ujar Kurniasih.

Menurutnya, persoalan utama yang disampaikan adalah penumpukan peserta JKN Penerima Bantuan Iuran (PBI) di puskesmas, akibat kebijakan yang secara otomatis

menempatkan peserta baru di fasilitas kesehatan milik pemerintah. Hal ini menyebabkan klinik swasta sulit berkembang meski berada dekat dengan masyarakat.

“Kita harus dorong agar pemindahan FKTP lebih mudah, dan akses masyarakat ke layanan kesehatan di sekitar mereka bisa ditingkatkan tanpa dibebani prosedur rumit,” lanjut Kurniasih.

Anggota Komisi IX DPR RI Alifudin menambahkan bahwa keberadaan klinik swasta justru sangat membantu pemerintah.

“Seharusnya puskesmas berterima kasih karena sebagian beban layanan ditopang oleh klinik. Apalagi jika klinik tersebut buka 24 jam. Ini bentuk kolaborasi, bukan kompetisi,” tegasnya.

Senada, Netty Prasetyani menyoroti kompleksitas regulasi dan tumpang tindih aturan yang menyulitkan penyedia layanan.

“Ini bukan soal siapa lebih besar, tapi bagaimana fasilitas kesehatan bisa berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Yang penting adalah masyarakat terlayani dengan baik,” kata Netty.

Ia juga mengusulkan adanya forum komunikasi FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) di tingkat daerah untuk membahas pembagian wilayah kerja, rujukan pasien, hingga integrasi data demi transparansi dan akuntabilitas layanan. Sementara itu, Achmad



“Data dan fakta yang disampaikan Asklin sangat penting bagi kami. Ini menjadi penguat dalam rapat-rapat kami bersama mitra, agar kebijakan yang dihasilkan lebih adil dan berpihak pada klinik swasta yang selama ini turut membantu pemerintah memberikan pelayanan kesehatan,”

**Dr. Hj. KURNIASIH
MUFIDAYATI, M.Si.**

Anggota Komisi IX DPR RI

Ru'yat menggarisbawahi bahwa Perpres Nomor 59 Tahun 2024 sebagai perubahan atas Perpres 82/2018 perlu dikaji lebih mendalam.

“Banyak laporan menyebutkan adanya ketidakefektifan pelayanan antara fasilitas negeri dan swasta. Bahkan, ada tahanan BPJS yang diminta dikembalikan meski pelayanan telah

diberikan. Ini harus jadi perhatian kita bersama,” ungkapnya.

Fraksi PKS berkomitmen untuk menindaklanjuti aspirasi ini melalui jalur formal, baik dalam Rapat Kerja bersama Kementerian Kesehatan maupun rapat dengar pendapat dengan BPJS Kesehatan dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN).



**Follow
Akun tiktok
Fraksi PKS DPR RI**

@fraksipksdprri



image istimewa

Rayakan Milad ke-23, PKS Tekankan Komitmen Melayani Rakyat

Jakarta (20/04) — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi merayakan Milad ke-23 pada hari ini, Minggu, 20 April 2025.

Selama lebih dari dua dekade, PKS telah menunjukkan komitmennya sebagai kekuatan politik yang konsisten berdiri bersama rakyat, melayani

"Kami tetap konsisten menjadi partai yang dekat dengan rakyat, bukan hanya menjelang pemilu, tetapi dalam setiap denyut kehidupan mereka,"

HABIB ABOE BAKAR ALHABSYI

Anggota Komisi III DPR RI

dengan hati, dan mengabdikan untuk kejayaan Indonesia.

"Kami tetap konsisten menjadi partai yang dekat dengan rakyat, bukan hanya menjelang pemilu, tetapi dalam setiap denyut kehidupan mereka," ujar Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera, Habib Aboe Bakar Alhabbsyi dalam keterangan persnya, Ahad, 20 April 2025.

Menurut Aboe Bakar, sebagai gerakan sosial-politik yang menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman, keadilan, dan pelayanan kepada umat, PKS telah melakukan kerja nyata di parlemen dan masyarakat.

"Milad ke-23 ini menjadi momentum konsolidasi dan refleksi atas kontribusi nyata PKS kepada bangsa," terangnya.

"Kami tidak sekadar bicara, tapi terus bergerak. 23 tahun ini adalah bukti bahwa PKS hadir dengan solusi, bukan hanya janji," tambahnya.

Dijelaskan Wakil Rakyat Dapil Kalsel I ini, PKS telah aktif

menyalurkan bantuan kemanusiaan, memperjuangkan hak-hak buruh dan petani, mendampingi UMKM, serta terlibat langsung dalam pelayanan sosial dan pendidikan masyarakat.

Tak hanya itu, sambung Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan DPR ini, dalam dunia legislatif, PKS terus mengawal kebijakan publik agar berpihak pada rakyat kecil dan memperjuangkan transparansi serta akuntabilitas pemerintahan.

Untuk itu, kata Anggota Komisi III DPR ini, dengan tema 'KOKOH MELAYANI, KONSISTEN MENGABDI', PKS mengajak seluruh elemen bangsa untuk tetap optimis menghadapi masa depan.

"Milad ke-23 ini bukan sekadar selebrasi. Ini penegasan komitmen kami untuk terus mengabdikan hingga akhir. PKS hadir untuk Indonesia yang hakiki," pungkasnya.



Peringati Milad PKS ke-23,

Alifudin Tegaskan Komitmen Bela Rakyat Kalimantan Barat dan Indonesia

Jakarta (22/04) — Dalam rangka memperingati Milad Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ke-23 yang jatuh pada tanggal 20 April 2025, Alifudin, Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Dapil Kalimantan Barat 1, menyampaikan rasa syukur dan terima kasihnya kepada seluruh masyarakat Kalbar.

Alifudin mengungkapkan bahwa kepercayaan dan dukungan masyarakat merupakan amanah besar yang terus dijaganya dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat di Senayan.

"Terima kasih saya sampaikan kepada masyarakat Kalimantan Barat yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk duduk di DPR RI melalui PKS. Amanah ini akan terus saya jaga dengan sungguh-sungguh untuk membela dan memperjuangkan kepentingan rakyat," ungkap Alifudin.

Sebagai Anggota Komisi IX

DPR RI yang membidangi tenaga kerja, kesehatan, dan kependudukan, Alifudin menegaskan komitmennya untuk terus menyuarakan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat, terutama dari Kalimantan Barat.

Ia memastikan bahwa setiap kebijakan yang diperjuangkan akan selalu berpihak kepada rakyat dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Alifudin juga menyampaikan bahwa PKS dan dirinya memiliki perhatian besar terhadap perlindungan tenaga kerja Indonesia, baik yang bekerja di dalam negeri maupun luar negeri.

"PKS konsisten mendorong agar hak-hak pekerja Indonesia terpenuhi, mulai dari jaminan sosial, upah layak, hingga perlindungan hukum. Kita tidak ingin ada pekerja kita yang terabaikan," tegas Alifudin.

Selain itu, Alifudin turut menekankan pentingnya perbaikan kualitas sistem kesehatan nasional. Ia mendorong agar pelayanan kesehatan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Kalimantan Barat, bisa lebih merata, terjangkau, dan berkualitas.

"Kesehatan adalah hak dasar rakyat. Negara harus hadir secara nyata dalam memberikan pelayanan kesehatan terbaik. Kita harus tingkatkan level pelayanan kesehatan kita agar masyarakat kita cukup berobat di dalam negeri saja, tidak perlu ke luar negeri lagi," tegasnya.

Menutupi pernyataannya, Alifudin memohon doa dan dukungan dari seluruh masyarakat agar dirinya senantiasa istiqamah dalam memperjuangkan aspirasi rakyat. Ia menegaskan bahwa PKS akan terus hadir bersama rakyat dan konsisten membela kepentingan seluruh masyarakat Indonesia.

"Insya Allah, saya bersama PKS akan terus berdiri di sisi rakyat, membela mereka, dan memastikan bahwa suara rakyat sampai ke pusat kekuasaan. Mohon doanya agar kami di PKS istiqamah dalam perjuangan ini," pungkasnya.



"Terima kasih saya sampaikan kepada masyarakat Kalimantan Barat yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk duduk di DPR RI melalui PKS. Amanah ini akan terus saya jaga dengan sungguh-sungguh untuk membela dan memperjuangkan kepentingan rakyat,"

H. ALIFUDIN, S.E., M.M

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Kalimantan Barat I

Momen Hari Kartini 2025, Reni Astuti Ajak Perempuan Refleksikan Semangat RA Kartini

Surabaya (21/04) — Peringatan Hari Kartini 21 April menjadi momen penting untuk merefleksikan eksistensi, aktualisasi, serta kontribusi kaum perempuan dalam perjalanan bangsa.

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dapil Jawa Timur I (Surabaya–Sidoarjo), Reni Astuti mengajak seluruh perempuan Indonesia untuk menggali kembali nilai-nilai perjuangan R.A. Kartini yang masih sangat relevan hingga hari ini.

Dalam rangka peringatan Hari Kartini, Reni hadir sebagai narasumber dalam acara diskusi 'Surabaya Pagi Ini' di RRI Surabaya bersama Bu Misyiah, Ketua Dewan Eksekutif Institut KAPAL Perempuan (Lingkaran Pendidikan Alternatif untuk Perempuan) pada Senin (21/4).

Diskusi tersebut mengangkat tema 'Perempuan: dari Emansipasi Menuju Aksi' yang menyoroti peran perempuan dalam membangun peradaban.

Dalam diskusinya, Reni menyampaikan bahwa Kartini adalah simbol inspirasi yang mengajarkan nilai kepedulian, semangat pantang menyerah, dan kekuatan literasi. Ketiganya menjadi modal utama dalam perjuangan kaum perempuan dari masa ke masa.

"Sebagai anak bangsawan, Kartini bisa saja hidup nyaman dan acuh terhadap sekitar. Tapi ia memilih peduli. Ia memperhatikan kondisi masyarakat, terutama kaum perempuan saat itu, yang masih sangat terbatas akses pendidikannya," tutur Reni.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa semangat pantang menyerah yang dimiliki Kartini harus menjadi inspirasi bagi perempuan hari ini.

"Di tengah keterbatasan

dan berbagai rintangan sosial, Kartini tetap berjuang. Ia menjadi simbol kegigihan perempuan dalam memperjuangkan perubahan," ungkapnya.

Tak kalah penting, Reni menyoroti kemampuan literasi Kartini yang membuat buah pikir dan nilai perjuangannya tetap abadi.

"Melalui surat-suratnya, pemikiran Kartini bisa tersebar luas, bahkan melintasi zaman. Ini menunjukkan betapa pentingnya kekuatan literasi dalam perubahan sosial," jelas Reni.

Mengakhiri pesannya, Reni mengucapkan selamat Hari Kartini kepada seluruh perempuan Indonesia. Ia juga mengajak para perempuan untuk menjalankan peran asasi sebagai ibu, istri, dan warga negara, sekaligus peran perluasan di berbagai lini kehidupan, termasuk pendidikan, ekonomi, politik, dan sosial.

"Mari kita maksimalkan peran kita sebagai perempuan dalam membangun generasi menuju Indonesia Emas 2045," pungkas Reni.



"Sebagai anak bangsawan, Kartini bisa saja hidup nyaman dan acuh terhadap sekitar. Tapi ia memilih peduli. Ia memperhatikan kondisi masyarakat, terutama kaum perempuan saat itu, yang masih sangat terbatas akses pendidikannya,

RENI ASTUTI, S.Si., M.PSDM.

Anggota Komisi V DPR RI



Peringati Hari Kartini, Nevi Zuairina: Perempuan Tiang Negara, Semangat Kartini Harus Terus Membara

Jakarta (22/04) --- Anggota DPR RI Fraksi PKS, Nevi Zuairina, mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjadikan peringatan Hari Kartini sebagai momentum refleksi dan pembaruan semangat perjuangan perempuan Indonesia dalam menghadapi tantangan zaman.

Menurutnya, semangat Kartini tak hanya hidup dalam buku sejarah, tetapi terus membara dalam setiap langkah perempuan Indonesia yang berdaya, tangguh, dan menginspirasi.

"Hari Kartini bukan sekadar seremonial tahunan. Ini adalah pengingat akan perjuangan panjang perempuan untuk mendapatkan hak, kesetaraan, dan ruang berkontribusi. Kartini telah membuka jalan, dan sekarang tugas kita melanjutkan perjuangan itu dalam bentuk nyata," ujar Nevi Zuairina dalam pernyataan tertulisnya.

Politisi PKS ini menegaskan bahwa di era modern ini, perempuan tidak hanya memperjuangkan akses pendidikan dan hak-hak dasar, tetapi juga dituntut untuk menjadi sosok multi-talenta—berperan sebagai ibu, istri, profesional, sekaligus pemimpin komunitas. Dalam berbagai posisi strategis di masyarakat dan pemerintahan, perempuan terbukti mampu bersaing dan membawa perubahan positif.

"Pendidikan adalah kunci

utama, sebagaimana diajarkan Kartini. Melalui pendidikan, perempuan dapat menjadi individu yang berdaya saing, memiliki kompetensi, dan mampu berinovasi. Namun, selain kecerdasan intelektual, perempuan juga dituntut memiliki kecerdasan emosional yang tinggi untuk menjaga keharmonisan rumah tangga dan lingkungan kerja," tambahnya.

Politisi PKS asal Sumatera Barat II ini juga menekankan

pentingnya solidaritas sesama perempuan dan dukungan dari keluarga serta negara. Menurutnya, perjuangan perempuan tidak boleh dibebankan secara individu, melainkan harus menjadi tanggung jawab kolektif bangsa.

Melalui semangat Kartini, Nevi Zuairina berharap seluruh perempuan Indonesia terus melangkah maju, membangun bangsa dengan hati dan akal, serta menjadi sumber inspirasi bagi generasi masa depan.

"Saya ingin tekankan bahwa perempuan adalah tiang negara. Jika perempuan kuat dan berdaya, maka bangsa ini pun akan berdiri kokoh. Oleh karena itu, negara harus hadir untuk memastikan adanya kebijakan yang berpihak pada pemberdayaan perempuan," tutup Nevi Zuairina.

"Pendidikan adalah kunci utama, sebagaimana diajarkan Kartini. Melalui pendidikan, perempuan dapat menjadi individu yang berdaya saing, memiliki kompetensi, dan mampu berinovasi. Namun, selain kecerdasan intelektual, perempuan juga dituntut memiliki kecerdasan emosional yang tinggi untuk menjaga keharmonisan rumah tangga dan lingkungan kerja,"

Hj. NEVI ZUAIRINA

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Sumatera Barat II

PROGRAM UNGGULAN

FRAKSI PKS DPR RI



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
Kecatif Atakrif Substantif

DIPLOMASI PARLEMEN



Kunjungan Resmi Fraksi
PKS kepada Mitra Fraksi
di Luar Negeri &
Ambassador's Talks

Upaya Fraksi mendukung diplomasi RI
melalui peran diplomasi parlemen, menjalin
persahabatan dan kerjasama dengan para
duta besar, parlemen negara sahabat,
organisasi internasional, dan mitra strategis
internasional lainnya





image istimewa

Bersama Delegasi Fraksi PKS HNW Sampaikan Dukungan ke Mahkamah Internasional Soal Illegalnya Pendudukan Israel dan Hentikan Genosida

Jakarta (16/04) — Wakil Ketua MPR RI yang juga Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid, bersama dengan delegasi anggota DPR RI dari Fraksi PKS

yang dipimpin oleh Ir Tifatul Sembiring, menyampaikan dukungan langsung kepada Mahkamah Internasional (International Court of Justice) di Den Haag, Belanda, agar

HNW sapaan akrabnya menyampaikan dukungan delegasi kepada Mahkamah Internasional untuk ikut mengawal keputusannya yang kemudian menjadi resolusi MU PBB sejak September 2024 lalu, karena sejak hal itu diputuskan, Israel bukan menampakkan niat baik menaati dengan mulai meninggalkan tanah-tanah pendudukan yang ilegal di Palestina,

'advisory opinion-nya' yang didukung oleh 124 negara anggota PBB menjadi Resolusi Majelis Umum PBB (A/REA/WS-1/24, pd 18 September 2024) yang utamanya terkait ilegalnya pendudukan Israel atas Palestina dan karenanya Israel harus meninggalkan kawasan-kawasan yang didudukinya dalam waktu 12 bulan, agar konsistensi disikapi dan serius dikawal untuk dilaksanakan, demi terjaganya marwah Mahkamah Internasional dan PBB juga untuk menyelamatkan kemanusiaan dan peradaban global.

"Kami dari Parlemen Indonesia, yang barangkali adalah Parlemen pertama yang hadir di Mahkamah yang terhormat di Den Haag ini, untuk menegaskan kembali Konstitusi kami yang menjadi komitmen kita bersama, yaitu menolak penjahatan dan mementingkan HAM, Kemanusiaan dan

Perdamaian, selain akuntabilitas dan aturan hukum internasional yang harus ditaati bersama," ujarnya di Den Haag, Belanda, Selasa (15/04/2025).

HNW sapaan akrabnya menyampaikan dukungan delegasi kepada Mahkamah Internasional untuk ikut mengawal keputusannya yang kemudian menjadi resolusi MU PBB sejak September 2024 lalu, karena sejak hal itu diputuskan, Israel bukan menampakkan niat baik menaati dengan mulai meninggalkan tanah-tanah pendudukan yang ilegal di Palestina, tetapi sebaliknya Israel (juga dengan membiarkan warganya) malah memperluas kejahatan penjahatannya, bukan hanya menyerang jalur Gaza, tetapi juga ke Tepi Barat dan Yerusalem Timur.

Bersama Delegasi Fraksi PKS HNW Sampaikan Dukungan ke Mahkamah Internasional Soal Illegalnya Pendudukan Israel dan Hentikan Genosida

« SEBELUMNYA

Dukungan ini, lanjutnya, sejalan dan menguatkan sikap Pemerintah Indonesia yang dahulu disampaikan langsung di forum Mahkamah Internasional oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan pembelaan terhadap bangsa Palestina yang diteruskan oleh pemerintahan saat ini yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto.

Selain itu, HNW juga menyampaikan dukungan penuh delegasi parlemen Indonesia ini terkait kasus yang sedang ditangani ICJ, yakni gugatan untuk menerapkan Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida di Jalur Gaza yang diprakarsai oleh Afrika Selatan terhadap Israel.

HNW juga memuji langkah Republik Afrika Selatan yang mengajukan kasus ini ke Mahkamah Internasional agar negara yang jelas-jelas melakukan Kejahatan Genosida seperti Israel dapat mendapat hukuman yang setimpal, serta memastikan dukungan mayoritas warga dunia termasuk Indonesia terhadap langkah itu.

Apalagi, di dalam putusan sela/putusan sementara dalam kasus itu pada Januari 2024, Mahkamah mengakui adanya potensi yang masuk akal terjadinya genosida terhadap bangsa Palestina di Gaza.

“Kami menyatakan dukungan penuh terhadap yurisdiksi dan mandat Mahkamah Internasional dalam menangani masalah serius dan mendesak ini, karena eskalasi di Gaza belakangan ini makin membuktikan terjadinya genosida bahkan sebagian pihak menyebut sebagai holocaust, ketika Israel mengabaikan putusan sela ICJ itu dengan melakukan kejahatan kemanusiaan antara lain berupa pembunuhan lebih banyak lagi kepada warga Gaza yang mayoritas korbannya

adalah perempuan dan anak, Israel juga menghancurkan semua rumah sakit termasuk RS Bapris di Gaza, juga dibombyi perkemah pengungsi, apalagi dengan penyetopan total masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza, baik makanan, minuman, obat-obatan, air dan listrik, yang semuanya itu membuktikan terjadinya genosida yang makin vulgar yang dilakukan oleh pihak Israel. Kami berharap agar dalam Persidangan yang akan datang Mahkamah Internasional dapat memberikan putusan final terjadinya genosida yang harus dihentikan dan pelakunya diberikan sanksi hukum yang adil,” tukasnya.

HNW mengingatkan bahwa Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida, yang diadopsi pada tahun 1948 setelah terjadinya kekejaman yang tak terbayangkan pada perang dunia II, bukan sekadar instrumen hukum, melainkan janji khidmat dari masyarakat internasional bahwa kekejaman semacam itu tidak akan pernah terjadi lagi.

“Saat ini, janji itu sedang diuji,” ujarnya.

Lebih lanjut, HNW menga-



takan situasi di Gaza saat ini telah menimbulkan pertanyaan yang sangat meresahkan tentang perilaku kejahatan kemanusiaan, genosida, penargetan warga sipil, dan potensi niat untuk menghancurkan, secara keseluruhan atau sebagian, suatu kelompok nasional, etnis, ras, atau agama—sebagaimana didefinisikan dalam Konvensi.

“Ini semua bukan sekadar masalah politik; ini adalah masalah hak asasi manusia yang mendasar di dalam hukum internasional yang tentunya menjadi perhatian utama dari Mahkamah Internasional,” tambahnya.

HNW juga memuji langkah Republik Afrika Selatan yang mengajukan kasus ini ke Mahkamah Internasional agar

negara yang jelas-jelas melakukan Kejahatan Genosida seperti Israel dapat mendapat hukuman yang setimpal, serta memastikan dukungan mayoritas warga dunia termasuk Indonesia terhadap langkah itu.

“Keberanian untuk bertindak atas nama mereka yang tidak bersuara, untuk menegakkan hukum demi membela kemanusiaan, patut mendapat pengakuan dan dukungan,” ujarnya.

“Kami mendesak Mahkamah ini untuk mempertimbangkan tidak hanya dimensi hukum, tetapi juga keharusan moral dan kemanusiaan yang meringkai kasus ini.

Bersama Delegasi Fraksi PKS HNW Sampaikan Dukungan ke Mahkamah Internasional Soal Illegalnya Pendudukan Israel dan Hentikan Genosida

« SEBELUMNYA

Melaksanakan keadilan, serta tidak menundanya. Apalagi dulu saat putusan sela ICJ di Januari 2024 atau ketika 'advisory opinion' Mahkamah Internasional dikeluarkan pada Juli 2024, korban yang tewas baru sekitar 45 ribuan warga, sekarang pada April 2025 jumlah warga yang dilaporan tewas sudah melebihi 50 ribuan warga yang mayoritas mutiaknanya adalah warga sipil: ibu-ibu, kaum perempuan, anak-anak, pekerja medis, wartawan

dan lainnya. Sehingga sangat perlu ada putusan tepat yang dapat cepat menghentikan genosida ini. Maka sangat benar bila Mahkamah Internasional kembali mengabdikan permintaan 'fatwa' dari PBB terkait agar Israel segera membuka perbatasan untuk masuknya bantuan-bantuan kemanusiaan ke Gaza, agar genosida terhindarkan, dan kemanusiaan terselamatkan," tegas Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini. Sementara itu Anna

Bonini, pejabat dari Mahkamah Internasional yang ditugaskan menerima delegasi FPKS, menyampaikan apresiasi atas kunjungan, kepedulian dan dukungan dari Parlemen Indonesia terhadap Mahkamah Internasional dan keputusan-keputusannya, dan sekalipun Anna Bonini menyampaikan terkait dengan kewenangan terbatas yang dimiliki oleh Mahkamah Internasional sebagai organ PBB dan sifat keputusan-keputusan Mahkamah Internasional, tapi tetap menjanjikan akan menyampaikan aspirasi-aspirasi ini ke Pimpinan Mahkamah Internasional.

"Hal itu kami mengerti, sekalipun disayangkan, tetapi menjaga marwah lembaga internasional seperti Mahkamah Internasional dan PBB, agar keputusannya terkait ilegalitas pendudukan Israel atas tanah Palestina, dibukanya bantuan kemanusiaan dan dihentikannya genosida di Gaza, penting terus didukung secara konsisten dan diperjuangkan agar dilaksanakan, juga untuk menyelamatkan kemanusiaan, peradaban global serta hukum internasional," pungkash HNW.



Image istimewa



“Kami menyatakan dukungan penuh terhadap yurisdiksi dan mandat Mahkamah Internasional dalam menangani masalah serius dan mendesak ini, karena eskalasi di Gaza belakangan ini makin membuktikan terjadinya genosida bahkan sebagian pihak menyebut sebagai holocaust, ketika Israel mengabaikan putusan sela ICJ itu dengan melakukan kejahatan kemanusiaan

**Dr. H.M. HIDAYAT
NUR WAHID, M.A**

Anggota Komisi VIII DPR RI



**Kunjungi
Kanal Resmi
Fraksi PKS DPR RI**



Website
fraksi.pks.id



Instagram
[@fraksipksdprri](https://www.instagram.com/fraksipksdprri)



Twitter
[@FPKSDPRRI](https://twitter.com/FPKSDPRRI)



Facebook
Fraksi PKS DPR RI



Youtube
PKSTV DPR RI



Tiktok
[@fraksipksdprri](https://www.tiktok.com/@fraksipksdprri)

***Nantikan
Setiap Pekan***